



HEBUTKAN BANGUN KOMP
DI LAHAN SENGKUH, KADES
NOMWALA BENI KILARAKASI

Pengangguran Terbuka di NTT 102 Ribu Orang

• BP3MI: Jangan Jadi Tamu di Rumah Sendiri

KUPANG, PK - Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Suratmi Hamida mengungkapkan, angka pengangguran terbuka di NTT saat ini mencapai 102.428 orang. Jumlah ini termasuk lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Pe-

luang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman yang merupakan hasil kerja sama Workshop FED & Ausbildung GIZ Jerman Indonesia dengan Universitas San Pedro Kupang di Hotel Harper Kupang, Selasa (9/6).

Menurut Suratmi, tingginya angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah

• Ke halaman 7



POS KUPANG/UNION BORO
SURATMI - Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida tampil dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman kerja sama Workshop FED & Ausbildung GIZ Jerman Indonesia dengan Universitas San Pedro Kupang di Hotel Harper Kupang, Selasa (9/6).

Bulog NTT Salurkan 11.344 Ton Beras SPHP

• Untuk Jaga Stabilitas Harga di Pasaran

KUPANG, PK - Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Sejak penugasan SPHP tahun 2026 dimulai pada Maret hingga Juni 2026, Bulog Kanwil NTT telah meny-

alurkan sebanyak 11.344 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi yang telah ditetapkan. Penyaluran beras SPHP dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan beras di pasar sekaligus menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Arrahim

• Ke halaman 7



POS KUPANG/YUAN LULAN
Arrahim K. Kanam

SPPG Kota Atambua Sempat Tak Beroperasi

■ Dana Operasional dari Pusat Sempat Tersendat

■ Manfaatnya Sangat Bagus untuk Siswa



POS KUPANG/HD
TANAM SAYUR - Pelajar SMK Negeri 6 Detukeli Ende saat menanam sayuran di kebun sekolah untuk pemenuhan Program MBG. INSERT - SMK Negeri 2 Ende sejak Januari 2026 tidak menerima MBG.

DPRD Minta Penataan

ANGGOTA DPRD NTT David Boymau meminta agar adanya penataan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. David juga setuju jika pengelolaan MBG meng-

nal, kita berharap di NTT penataan pelaksanaan MBG itu ditata lebih baik lagi," katanya, Selasa (9/6). Dengan penataan itu maka pelayanan ke sasaran bisa lebih tepat. Ia juga mendorong percepatan pembangunan dapur MBG agar memberi manfaat lebih luas bagi para penerima, terutama di pelosok-pelosok.

Politikus Hanura ini juga menanggapi adanya desakan dari kelompok pemuda mahasiswa di NTT agar aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap operasional dapur MBG. "Kita berharap dengan adanya penangkapan dan pene-

• Ke halaman 7



MBG Dikelola Kantin Sekolah

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini belum semua merasakan manfaat program tersebut. Salah satunya adalah SMK Negeri 6 Detukeli Ende yang berlokasi di Wolobetho Feoria, Kecamatan Detukeli. Belum tersalurkannya program MBG ke sekolah tersebut

disebabkan oleh belum tersedianya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Detukeli. Akibatnya, para siswa masih menunggu realisasi program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik tersebut.

Kepala SMK Negeri 6 Detukeli Ende, Herman Bheo, mengatakan, meskipun sekolahnya belum menerima layanan MBG, pihak sekolah sebenarnya telah siap mendukung program tersebut melalui penyediaan bahan pangan lokal. Menurutnya, sekolah kejuruan yang memiliki sa-

• Ke halaman 7

Sejak mulai beroperasi pada 13 November 2025 lalu, kami didukung oleh 51 orang tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, satu ahli gizi, satu akuntan dan satu kepala SPPG.

MARIA GH. PAH
Kepala SPPG Kota Atambua

• Ke halaman 7

Marcella Zalianty Ditantang Rekan

SETELAH lebih banyak dikenal sebagai aktris dan produser, Marcella Zalianty mengungkapkan keinginannya untuk kembali duduk di kursi sutradara. Hasrat itu muncul setelah dirinya menyaksikan berbagai karya dari sineas dunia saat menjadi Juri di Bali International Film Festival (Bali-nale) 2026.

Selama beberapa tahun terakhir, Marcella mengaku lebih fokus berakting dan memproduksi film. Namun, dorongan dari rekan-rekan sesama pelaku industri membuatnya mulai mempertimbangkan untuk

• Ke halaman 7

DEKAN FKKH TEGASKAN PEMBAYARAN TIDAK MELALUI PIHAK KETIGA

Undana Buka Program Pendidikan Dokter Spesialis

Ini program yang sangat luar biasa untuk menjawab kebutuhan dokter obgyn yang saat ini memang masih dibutuhkan. Diharapkan satu kabupaten itu minimal dua sampai tiga dokter obgyn,

FAKULTAS Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang resmi membuka pendaftaran untuk mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) tanggal 8-22 Juni 2026 untuk dua spesialis yakni Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) dan Anestesiologi dan Terapi Intensif. Dekan FKKH Undana, Dr. dr. Christina Olly

Lada, MGizi dalam Podcast Undana Talk di Pos Kupang, Selasa (9/6) mengatakan, Undana tidak menggunakan pihak ketiga dalam merekrut mahasiswa. "Jadi pendaftaran dan pembayaran itu langsung dilakukan di Undana, tidak melibatkan pihak manapun dalam hal pendaftaran ataupun dalam penerimaan mahasiswa dan

• Ke halaman 7



POS KUPANG/HD
UNDANA TALK - Dekan FKKH Undana, dr. Christina Olly Lada bersama jurnalis Pos Kupang, Ella Uzursi dalam Undana Talk, Selasa (9/6).

MILIKI RUMAH DENGAN BUNGA RINGAN

BPJS Ketenaga kerjaan NTT menyerahkan secara simbolis manfaat Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada peserta BPJS Ketenaga kerjaan dari lingkungan Sinode GMIT di GMIT Center Kupang, Selasa (9/6). Penerima manfaat MLT tersebut adalah Aprileny Dorisance Mata Ratu yang diwakili oleh suaminya.

Salam

Kerja di Jerman

MENEMBUS pasar kerja Eropa bukan sesuatu yang muskil bagi pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT resmi membuka jalan bagi putra-putri Flo-bamora berkarier di Jerman melalui jalur formal yang menjanjikan. Ini merupakan langkah strategis memotong rantai pengangguran sekaligus meningkatkan standar kompetensi pekerja migran NTT ke level dunia.

Sudah jadi rahasia umum bahwa NTT diselimuti masalah pengangguran, sementara kesempatan kerja lokal sangat terbatas. Berdasarkan data statistik tahun 2025, jumlah angkatan kerja di NTT mencapai 3.091.518 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.989.090 orang telah bekerja di berbagai sektor, sedangkan 102.428 orang lainnya masih menganggur.

Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak SDM produktif yang bergantung pada pendapatan orang lain. Di sisi lain, ada peluang besar berkarier di luar negeri, khususnya di Jerman. Melalui kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT mendorong pekerja migran asal NTT naik kelas. Kerja sama ini berfokus pada penempatan di sektor formal yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi khusus.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Skema FachkrAftewanderungsgesetz (FEG) dan Ausbildung (Pendidikan Vokasi) Jerman. Kegiatan ini digelar di Hotel Harper Kupang pada Senin 8 Juni 2026.

Namun, untuk dapat bekerja di Jerman, setiap calon tenaga kerja wajib memenuhi standar negara tersebut. Seluruh kualifikasi keahlian harus dibuktikan dengan sertifikat resmi. Sebagai contoh, tenaga pengecoran pada proyek bangunan atau tukang las wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan lembaga resmi. Secara umum, persyaratan utama untuk bekerja di Jerman meliputi kontrak kerja yang sah dari perusahaan di Jerman. Kualifikasi pendidikan atau vokasi yang diakui secara resmi. Kemampuan bahasa Jerman minimal tingkat B1 atau B2. Visa Kerja khusus atau EU Blue Card. Proses ini dimulai dari penyediaan dokumen hingga urusan izin tinggal.

Terkait kualifikasi pendidikan dan pengalaman, calon pekerja minimal harus lulus program Diploma 3 (D3) atau Sarjana (S1) dari universitas terakreditasi. Ijazah wajib melalui proses penyetaraan (Anerkennung) agar diakui sesuai standar Jerman.

Calon pekerja dapat memeriksa status universitas dan gelar mereka secara mandiri melalui basis data resmi Anabin. Selain jalur akademik, beberapa sektor khusus seperti teknologi informasi (IT) memberikan kelonggaran berupa penggantian kualifikasi akademik formal dengan pengalaman kerja profesional minimal 3 tahun. Hal yang tidak kalah penting adalah penguasaan bahasa. Calon pekerja wajib memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jerman minimal level B1 atau B2 standar Goethe-Institut atau telc. Khusus pemegang EU Blue Card di bidang spesialis tertentu, kemampuan bahasa Inggris tingkat lanjut kadang diperbolehkan jika disyaratkan oleh perusahaan multinasional yang dituju.

Berbagai persyaratan di atas dapat dipenuhi jika disiapkan dengan matang. Calon pekerja juga harus memahami budaya Jerman. Negara itu menjunjung tinggi kebebasan, namun tetap dibatasi aturan sosial dan hukum. Jerman juga sangat disiplin. Bagi anak muda NTT, kesempatan emas ini patut dicoba. (*)

Telepon Penting!

0380

PT ASDP : 833481/89400

Piket Polda : 021956

Piket Polres : 028388

Piket Keram 161WS : 033311

Peradam Kebakaran : 025766

Brigade Kupang Selat : 027777

Kantor SAR : 081111

PT Petri : 021944

Hotline Public Service

Anda menghadapi masalah terkait pelayanan publik? Kami akan membantu mencari solusi melalui pihak-pihak yang berkompeten. Mari kita membangun NTTI Hubungi kami di :

WA : 0852 3819 5456 SMS : 0812 3926 5126 Telp: 0380-833820 SMS: 082339699499 Email: kupang_poskupang@gmail.com

Perang Melawan Sampah Plastik di NTT

Oleh:

Aris Wawo, SVD

Guru SMA St. Arnoldus Janssen Kupang

BANGSA Indonesia sudah merdeka dari penjajah asing lebih dari 80 tahun. Kolonialisme asing sudah selesai, ada bentuk kolonialisme dengan wajah baru yaitu sampah. Sampah plastik menjadi ancaman lingkungan terbesar di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah timbunan sampah 2025 mencapai 141.926 ton per hari dengan 37.001 ton sudah dikelola (Kompas.com 7 April 2026). Mengerikan!

Di ibu kota Kabupaten Sikka misalnya, jumlah timbunan sampah sekitar 132 ton per hari (kompas.com, 30 Maret 2026), sedangkan di Kota Kupang mencapai 267 ton per hari (Prokopim Kota Kupang, 9 April 2026). Dua kota ini menjadi wakil dari NTT yang secara gamblang menunjukkan bahwa sampah sedang menjadi momok yang mengerikan dan menakutkan saat ini.

Sampah pada gilirannya merusak ekosistem laut, darat dan udara. Studi Bappeas (2025) memperkirakan kerugian akibat pencemaran plastik di sektor perikanan dan pariwisata Rp12,1 triliun per tahun. Tindakan preventif terhadap sampah plastik merupakan panggilan nurani setiap orang. Melawan sampah dengan cara-cara kreatif adalah cara lain menolak kolonialisme baru.

Keindahan Di NTT: Suatu Ironi

NTT merupakan provinsi yang kaya akan budaya dan bahasa serta keindahan alam. Bukan tidak mungkin NTT diminati para wisatawan. Dilansir dari detikbali (Minggu, 18 Januari 2026) di Labuan Bajo, kunjungan wisatawan asing ke sana 500 ribu. Ini merupakan berita membanggakan. Selain Labuan Bajo, wilayah-wilayah lain NTT dikenal eksotis. Ada banyak wisatawan yang mengunjungi Alor, Sumba dan beberapa wilayah di Flores.

Keindahan adalah idaman dan harapan semua orang. Semua orang ingin menyaksikan ruangan yang asri, toilet umum yang bersih, taman-taman yang indah dan sejuk. Keindahan ini sebagai ironi ketika menyaksikan sampah yang berseliweran di tepi-tepi pantai serta di tempat umum lainnya. Di beberapa tempat, orang membuang sampah di tempat yang dilarang

pemilik tanah.

Di Kota Kupang misalnya, drainase masih menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Kita juga menyaksikan sampah-sampah plastik dibuang di pinggir jalan dari kendaraan mewah. Banyak pelaku bisnis masih menggunakan plastik sebagai tempat menyimpan barang-barang belanjaan para pembeli. Plastik masih menjadi wadah dalam transaksi jual-beli di pasar dan pertokoan. Belum ada upaya bersama menyelesaikan masalah ini secara masif dan profesional.

Sekolah Sampah

Pertanyaan paling dasar: Bagaimana cara agar warga NTT memiliki kepedulian terhadap sampah secara spontan? Kepedulian terhadap sampah harus dimulai sejak dini. Ada beberapa pihak yang menjadi "sekolah sampah". Memilih, memilih dan membuang sampah pada tempatnya serta mengurangi sampah butuh sekolah.

Pertama, keluarga. Keluarga adalah komunitas pertama seorang anak bertumbuh dan berkembang secara utuh. Di tempat ini, anak belajar tentang hidup sehat dan bersih. Salah satu hal yang dapat diajarkan kepada anak-anak adalah memilih, memilih, dan membuang sampah pada tempatnya serta mengurangi sampah. Sampah dibedakan dalam dua bentuk yaitu sampah organik dan anorganik. Memberikan pengetahuan yang memadai kepada anak-anak tentang sampah merupakan tugas utama orang tua. Orang tua turut bertanggung jawab mendidik anak-anak untuk mencintai lingkungan hidup secara benar.

Hal pertama yang harus dilakukan orang tua adalah memberi teladan. Keteladanan orang tua merawat dan memperhatikan lingkungan rumah adalah mutlak. Menyapkan bekal untuk anak-anak misalnya, dan mewajibkan anak-anak membawa thumb er adalah cara paling jitu mengurangi sampah plastik. Kebiasaan harus selalu dilatih sejak dini, sama halnya dengan

disiplin. Membawa bekal dan thumb er setiap hari ke sekolah adalah salah satu bentuk dari latihan tentang kecintaan terhadap lingkungan.

Perilaku seperti ini diakukan berulang, akan menjadi kebiasaan. Ada ungkapan latin yang cukup familiar adalah *Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo*. Ungkapan ini berarti tetesan air melubangi batu bukan karena kekuatannya, tetapi karena jatuhnya yang terus-menerus.

Mengurangi penggunaan plastik misalnya, dapat menjadi kebiasaan bukan sekadar tindakan ini terpuji tapi karena diakukan terus-menerus. Hal lain yang dibutuhkan adalah dialog kehidupan di rumah. Dialog adalah cara lain memberi pemahaman yang akurat kepada anak-anak tentang lingkungan hidup.

Dialog tidak sekadar membangun komunikasi, tapi sebagai upaya sadar untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak melalui cara sederhana. Misalnya, membiasakan anak menikmati masakan ibu secara bertanggung jawab.

Artinya ia menikmati makanan itu sampai selesai dan tanpa sisa. Keteladanan dan dialog kehidupan tidak cukup dilakukan dengan keberanian, mesti dilakukan secara konsisten. Kualitas keteladanan dan dialog kehidupan ada pada konsistensi melakukannya. Tidak sedikit orang yang menyerah terhadap nilai-nilai karena rapuhnya konsistensi.

Belajar dari UPTD SDN Papela

Kedua, sekolah. Sekolah adalah pihak kedua yang bertanggung jawab membina para murid untuk mencintai lingkungan hidup. Sekolah-sekolah di NTT harus berperan melawan sampah, karena sekolah masih menjadi produksi sampah plastik paling banyak. Kesadaran para murid untuk membuang sampah pada tempatnya dan kecintaan terhadap lingkungan masih jauh panggang dari api.

Salah satu pikiran alternatif yang dapat menjadi acuan untuk menjadikan sekolah sebagai

rumah yang aman dan nyaman dari sampah adalah membangun pemahaman bersama tentang kecintaan terhadap lingkungan hidup melalui seminar, animasi-animasi dan praktik mendaur ulang sampah.

Seminar dan animasi-animasi berbasis lingkungan hidup pada gilirannya memberikan kepercayaan kepada para murid untuk berpikir secara benar. Para murid peduli tentang sampah karena pengetahuan yang sudah diperolehnya. Sampah dan dampaknya tidak sedang dibahas secara khusus sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah formal.

Itu berarti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah untuk mengolah sampah bersama para murid. Sekolah harus memiliki strategi konkret untuk mendulang semangat dan sikap cinta murid terhadap lingkungan.

UPTD SDN Papela bisa menjadi contoh. Sekolah ini terletak di Kecamatan Rote Timur dan dikenal luas setelah memperoleh Juara 1 Kompetisi AIA Healthiest Schools 2025 kategori SD di panggung nasional. Sekolah ini sukses mendidik dan melatih para murid untuk memahami sampah-sampah plastik dan mendaur ulang melalui program *ecolitera*. *Ecolitera* dijalankan untuk menjawab dua tantangan utama di sekolah tersebut yaitu rendahnya minat baca murid dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mereka menyulap plastik, ban bekas, dan sampah organik menjadi media belajar kreatif.

Murid diajak menulis, membaca dan berpikir kritis melalui media daur ulang seperti *Plasti-Kata*, *ecobrick*, dan taman belajar dari ban bekas. Kemampuan UPTS SDN Papela mengolah sampah secara benar dan kontekstual dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah di NTT dan Indonesia pada umumnya.

Pengolahan sampah secara benar adalah tanggung jawab kolektif warga sekolah dan belajar praktik baik dari sekolah ini adalah berkat.

Ketiga, pemerintah. Edukasi tentang lingkungan yang bersih dan asri harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Pemimpin daerah belum menangani sampah

secara militan dan masif. Gerakan kebersihan masih merupakan tanggung jawab utama para petugas kebersihan.

Regulasi pemerintah daerah tentang sampah masih menjadi imbauan dan belum menjadi aksi nyata. Regulasi tentang penggunaan barang-barang alternatif yang ramah lingkungan belum ada. Misalnya, para pembeli diwajibkan untuk menggunakan tas-tas anyaman (keranjang) buatan masyarakat lokal yang bertahan lama dan ramah lingkungan.

Hemat penulis, penggunaan keranjang-keranjang buatan masyarakat lokal bernilai ekonomis. Masyarakat lokal akan menjadi lebih kreatif mengembangkan kerajinan tangan sesuai dengan kebutuhan pasar. Boleh jadi, produk-produk seperti itu laku di pasaran. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan para pelaku bisnis untuk membatasi penggunaan plastik. Acap kali kepedulian terhadap sampah tidak dari para pelaku bisnis. Kepedulian terhadap sampah justru berasal dari keprihatinan sekelompok orang.

Pemerintah mesti menjadi fasilitator dan eksekutor menanggulangi sampah di tingkat daerah secara serius melalui pembatasan penggunaan plastik dan penyediaan infrastruktur daur ulang yang memadai.

Keempat, masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama kebijakan dan aturan pemerintah. Sampah dan penangananannya mesti dilakukan secara aktif terhadapnya. Kebersihan adalah salah satu contohnya. Pemerintah juga telah menyiapkan piagam adipura bagi kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Kebersihan dapat dicapai lewat usaha, kerja keras dan kerja sama yang solid.

Tanggung jawab kolektif memerangi sampah adalah imperatif. Kita memiliki peran yang sama dan semangat yang sama untuk memerangi sampah. Kita kepalakan tangan, satukan tekad untuk mengatakan tidak terhadap sampah plastik, sebab sampah adalah bentuk lain dari kolonialisme baru. (*)

POJOK

BGN Tidak Akan Buka SPPG Baru
Benahi dulu yang ada

Iwan Fals Disambut Hangat warga Kupang
Syair lagunya tak lekang oleh waktu

Nilai Tukar Rupiah Masih Lemah
Porsi nasi campur makin mini

Baris Hoki | **Rp.6.600/baris** | **maximal 10 baris**

PROMOSIKAN BISNIS ANDA

Informasi Pemasangan Iklan | R.W Monginsidi No 3 Fatululi - Kupang NTT | (0380) 833820 | email : klerpek@gmail.com | http://kupang.brnews.com

HATI - HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN POS KUPANG, KAMI TIDAK PERNAH MENGHUBUNGI PEMASANG IKLAN UNTUK KONFIRMASI JUAL BELI PRODUK YANG DIKLANKAN

RUMAH DIKONTRAKAN
Rumah dikontrakan, 4KT, 2KM, 1 Garasi mobil, lok pinggir jalan umum, smgp kantor Badaan SARI Perulu. Hub Bapak Suban: 085253101020

RUKO DIJUAL
Dijual 3 unit ruko 3LT Jadi Sahu, UK : 15x25m², 5 Km Dgn KM Dlm, 4 KM Luar, Baru & Mewah. Hub: 085108030888

TANAH DIJUAL
Dijual sebidang tanah uk: 14x25m, lok Maulata. Hub: 085737267730

RUPA-RUPA
Dijual TV 32" LED, Spring bed, Ariston water heater semua ada & kondisi baru HARGA MURAH lokasi Ende Hub 0821 4586 1208

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA
833820

POS KUPANG
Harian Pagi

Penerbit: PT Timor Media Grafika/Kelompok Kompas Gramedia. SIUPP No: 282/SK/MENPEN/SIUPP/A.6/1992 tgl 6 Oktober 1992. Terbit sejak 1 Desember 1992.

Tin Editor/penyunting: OMSMY Novemy Leo, Alfred Dama, Siprianus Seko, Hermina Pello, Apolonia Mathilde Dhiu, Adiana Ahmad, Elin Rote, Maria Eno Teda, Yeni Rahmawati, Ferdinandus Dole Hayong, Yakobus Lewannema, Adrianus Nong Loba. Reporter: Ray Rebon, Ella Uzurasi, Irian Hoi, (Kota Kupang); Alexander Novallano Demo Paku (Kabupaten Kupang); Elisabeth E. Mei (Sabu Raijua); Mario G Tieti (Rote Ndao); Kristoforus Bota (Malaka); Maria Vianey Gokok (Soe); Dionisius Rebon (Kefamenanu); Agustinus Tanggur (Belu); Hilarius Nina, Gordy Donofan (Mauмери); Robertus Rogo (Manggarai Timur); Albert Aquinaldo (Ende); Charles Abar (Bajawa & Nagekeo); Angelbertus Klau (Manggarai Barat); Paulinus Irfan Budiman (Sumba Timur); Petrus Piter (Sumba Barat, Sumba Tengah & Sumba Barat Daya); Desainer/Tata Wajah: Bildad Lelan, Nikodemus Sine; Olah Video: Jhoni Simon Lena, Dofris Meta, Yuvon Helmy. Tin Marketing: Kristanto Bisilisin, Clara Maria Yuliana Marli, Teddy Diaz (Promosi & EO), Sari Jelalu (Operasional). (Peretakan). Genc. Bank NTT No.2360/G, BRI No.0039-01-000413-30-1, BNI 46 No. 0044981796, BCA No. 314.030.788. JAKARTA. News Director: Febby Mahendra Putra; News Vice Director/GM Jakarta Content: Domuwara

D Amberta; GM Content Digital: Yuli Sulistyawati; News Manager: Rahmat Hidayat; Koordinator Kompartemen Polihuan: Dodi Eswandi; Koordinator Kompartemen Megapolitan: Soewida Herandi, Yogi Gustaman; Koordinator Kompartemen Ekonomi dan Bisnis: Frederikus Mahadma Teguh Is; Koordinator Kompartemen Seleb dan Lifestyle: Willy Widarto; Koordinator Kompartemen Olahraga: Eko Priyono; Koordinator Kompartemen Audio-visual: Alamat Kantor: Jalan RW Monginsidi No. 3 Fatululi Kupang - 85118, Telp. (0380) 833820 (Redaksi, Iklan, Sirkulasi); Email: kupang_poskupang@gmail.com; Alamat Kantor Maumere: Jalan Gelora No. 2 - Tlp. (0382) 22363; Alamat Kantor Jakarta: Gedung Tribun Network-Kompas Gramedia, Jln Palmerah Selatan No. 3, Jakarta Pusat 10270 - Telepon: 021-5359325, Fax: 021-5359323. Percetakan: PT Timor Media Grafika (Jl di luar tanggung jawab percetakan). Alamat Percetakan: Jalan RW Monginsidi No. 3 Fatululi Kupang-85118.

Website: http://www.pos-kupang.com Facebook: POS-KUPANG.COM Instagram: poskupangcom YouTube: Pos Kupang

MEDIA TERVERIFIKASI DAN DEWANG PERS



BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS Ketenagakerjaan NTT menyerahkan secara simbolis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dari lingkungan Sinode GMTI di GMTI Center Kupang, Selasa (9/6).

Miliki Rumah dengan Bunga Ringan

Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

KUPANG, PK - BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan secara simbolis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dari lingkungan Sinode GMTI di GMTI Center Kupang, Selasa (9/6).

Penerima manfaat MLT tersebut adalah Aprileny Dorisance Mataratu yang diwakili oleh suaminya. Melalui program tersebut, peserta memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman perbankan konvensional.

Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan NTT, Luki, mengatakan, MLT merupakan salah satu bentuk manfaat tambahan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan selain perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua.

Luki mengatakan, hal ini merupakan salah satu bentuk manfaat yang kami berikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu anggota GMTI Sinode atas nama Ibu

Aprileny Dorisance Mataratu telah mendapatkan manfaat layanan tambahan berupa bantuan keringanan suku bunga untuk pinjaman di bank.

"Saat akad kredit bulan lalu, beliau mendapatkan suku bunga 7,75 persen flat, jauh lebih rendah dibandingkan jika mengajukan pinjaman langsung ke perbankan," ujar Luki di GMTI Center Kupang, Selasa (9/6).

Luki menambahkan, Program MLT diberikan kepada peserta yang telah terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), serta perusahaan tempat bekerja tidak memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan persetujuan terhadap pengajuan MLT yang direkomendasikan oleh pihak perbankan.

Luki menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada pemberian santunan akibat kecelakaan kerja, kematian, maupun manfaat hari tua, tetapi juga menghadirkan program pendukung kesejahteraan pekerja melalui

fasilitas perumahan.

Penerima manfaat dari lingkungan GMTI tersebut memperoleh pinjaman KPR hampir Rp300 juta melalui kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN.

"Program ini tidak dikenakan biaya tambahan sepeser pun. Siapapun peserta yang memenuhi syarat akan kami proses sehingga bisa memperoleh manfaat yang lebih baik, khususnya untuk kepemilikan rumah," katanya.

Mekanisme pengajuan MLT diawali melalui pihak perbankan. Setelah calon debitur dinyatakan layak menerima pinjaman, pihak bank akan meneruskan rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk proses persetujuan manfaat layanan tambahan.

"Selain syarat kepesertaan aktif dan tidak adanya tunggakan iuran, peserta juga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank penyalur kredit," kata Luki.

Pada tahun 2026, kerja sama pemanfaatan MLT di lingkungan GMTI baru mencatat satu penerima manfaat dan satu pengajuan lainnya sedang dalam proses. (uan)

Bulog Percepat Distribusi ke Penerima

KUPANG, PK - Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat. Hal ini dilakukan Perum Bulog guna mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, menjelaskan, pada Juni 2026, realisasi distribusi Bantuan Pangan Beras di NTT telah mencapai 63,74 persen dari total Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penyaluran

dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di wilayah NTT.

Bulog Kanwil NTT bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mempercepat proses distribusi agar seluruh penerima bantuan dapat segera menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Arrahim mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Penyaluran Bantuan Pangan dan beras SPHP dilakukan secara bersamaan untuk memastikan keter-

sediaan beras tetap terjaga serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.

"Kombinasi kedua program ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur," ujarnya, Selasa (9/6).

Arrahim menegaskan, Bulog NTT berkomitmen memastikan seluruh bantuan pangan tersalurkan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain menjalankan penugasan distribusi bantuan

pangan, Bulog juga terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

Bulog NTT mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat mencukupi.

"Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja dan bersinergi untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga beras, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan," kata Arrahim. (uan)

Pelayanan Prima Jika Lngkungan Bersih

PLN Flores Bagian Timur Maknai Hari Lingkungan Hidup

MAUMERE, PK - Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Timur menggelar aksi resik lingkungan di area kantor.

Langkah ini dilakukan PT PLN UP3 Flores Bagian Timur, sebagai wujud nyata komitmen korporasi dalam menciptakan ruang kerja yang bersih, sehat, sekaligus menumbuhkan kepedulian kolektif terhadap kelestarian alam.

Aksi ini melibatkan seluruh insan PLN UP3 Flores Bagian Timur. Tanpa sekat, para pegawai bergotong-royong membersihkan area perkantoran, halaman, taman, hingga saluran drainase. Tidak sekadar membersihkan, mereka juga memilah sampah sesuai jenisnya sebagai bagian dari edukasi pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT), F. Eko Sulistyono, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini.



BERSIHKAN LINGKUNGAN - Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Timur menggelar aksi resik lingkungan di area kantor.

Menurutnya, menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni tempat kerja, sebelum membawa dampak yang lebih luas ke tengah masyarakat.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekadar seremonial tahunan bagi PLN. Ini adalah momentum pengingat bahwa keandalan pasokan listrik yang kami hadirkan

untuk masyarakat NTT harus berjalan selaras dengan kelestarian alam. Membudayakan hidup bersih di lingkungan kantor adalah fondasi penting untuk membangun pola pikir yang peduli pada keberlanjutan lingkungan di kehidupan sehari-hari," ujar Eko.

Senada dengan hal tersebut, Manager PLN UP3 Flores Bagian Timur mengungkapkan bah-

wa lingkungan kerja yang bersih dan sehat, memiliki korelasi langsung terhadap performa dan kenyamanan karyawan dalam melayani pelanggan.

"Melalui kegiatan bersih-bersih ini, kami ingin memupuk kembali semangat kebersamaan dan gotong-royong. Lingkungan yang nyaman tentu akan meningkatkan produktivitas kerja. Jika ruang kerja kita sehat, energi positifnya akan terpancar dalam kualitas pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat," ungkapnya.

Melalui aksi serentak ini, PLN UP3 Flores Bagian Timur berharap gerakan ramah lingkungan ini tidak berhenti sebagai agenda satu hari saja, melainkan bertransformasi menjadi gaya hidup yang konsisten bagi seluruh pegawai. Dengan semangat kolaborasi, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga bumi yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. (*/vel)

Senyum Warga Lima Desa di Sumba

Sambut Hadirnya Listrik PLN



TIANG LISTRIK - Kekompakan dan kerja sama tim sangat di butuhkan untuk proses pendirian tiang listrik yang dilakukan oleh para petugas mitra kerja pelaksana pembangunan jaringan listrik desa.

WAINGAPU, PK - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (PLN UIW NTT) memberikan kado terindah bagi masyarakat Pulau Sumba dengan mengalirkan listrik ke lima desa yang selama ini menanti dalam gulita.

Hari Lahir Pancasila tidak sekadar diperingati dengan upacara, tetapi diwujudkan nyata melalui hadirnya keadilan energi hingga ke pelosok negeri. Langkah nyata PLN ini berhasil mendongkrak Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Sumba menjadi 91,91 persen per Mei 2026.

Lima desa yang kini resmi merasakan kemerdekaan energi tersebut adalah Desa Lailanjanj kabupaten Sumba Timur, Mata Wee Lima,

Wee Baghe, Manu Toghi, dan Waipakolo Kabupaten Sumba Barat Daya. Kehadiran aliran listrik ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai luhur Pancasila—khususnya keadilan sosial—kini benar-benar menyalir di rumah-rumah warga.

General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, menyampaikan bahwa perjuangan menembus batas geografis demi melistriki desa terpencil adalah bentuk dedikasi PLN dalam membumikan Pancasila. "Harapan kami, dengan hadirnya listrik di kampung tersebut akan menyinari dan membawa harapan baru bagi masyarakat di tempat itu. Momentum Hari Lahir Pancasila ini menjadi pengingat bagi kami bahwa keadilan

sosial harus diwujudkan lewat pemerataan akses energi. Listrik bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan hak dasar yang akan membuka gerbang kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita di Sumba," ungkap Eko. Perjuangan PLN UP2K Sumba dalam membentangkan jaringan listrik di daratan Sumba kini mulai membuahkan hasil yang merata di empat kabupaten. Saat ini, Kabupaten Sumba Tengah telah sukses mencatatkan pencapaian 100 persen desa berlistrik (65 desa).

Disusul oleh Kabupaten Sumba Barat yang telah melistriki 73 dari 74 desa, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 172 dari 175 desa, serta Kabupaten Sumba Timur yang kini telah mengaliri 122 dari 156 desa.

Kerja keras insan PLN di lapangan yang harus melewati kawasan hutan, medan terjal, hingga keterbatasan akses jalan, terasa ringan berkat adanya tradisi gotong royong yang kuat dari masyarakat setempat. Warga desa secara sukarela turun ke jalan membantu petugas melakukan perabasan pohon demi kelancaran penarikan jaringan kabel. Kepala Desa Lailanjanj, Lazarus B. Nggioku, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagiannya mewakili seluruh warga desa. (*/vel)

SPMB MANDIRI

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

JALUR MANDIRI POLTEKES KEMENKES KUPANG

2026/2027

BIAYA PERKULIAHAN - UANG KULIAH TUNGGAL

TANGGAL PENDAFTARAN

27 April - 6 Juni 2026

LINK PENDAFTARAN

pmb.poltekkeskupang.ac.id

PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH - UKT
DIII Keperawatan	Rp. 3.950.000
DIII Teknologi Laboratorium Medis	Rp. 4.000.000
DIII Kebidanan	Rp. 3.950.000
DIII Kesehatan Gigi	Rp. 3.500.000
DIII Sanitasi	Rp. 3.500.000
DIII Farmasi	Rp. 3.950.000
DIII Gizi	Rp. 3.650.000
DIV Keperawatan Reguler	Rp. 4.750.000
DIV Keperawatan Internasional	Rp. 5.750.000
DIV Keperawatan - RPL	Rp. 6.500.000
DIV Kebidanan	Rp. 4.950.000
Profesi Ners	Rp. 7.950.000
DII PJJ Kebidanan	Rp. 6.600.000
DIII PJJ Keperawatan	Rp. 6.600.000

BEBAS BIAYA PEMBANGUNAN & BEBAS BIAYA WISUDA

BIAYA PENDAFTARAN

- Reguler: Rp. 300.000
- RPL & Profesi: 550.000

KONTAK

0813 9390 4607(Chat Only)

www.poltekkeskupang.ac.id

polkeskupang

direktorat@poltekkeskupang.ac.id

Distribusikan Guru Negeri ke Sekolah Swasta

● Komitmen Pemkab Ngada

BAJAWA, PK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada terus mendorong pemerataan mutu pendidikan melalui kebijakan pendistribusian guru negeri ke sekolah-sekolah swasta yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Bupati Ngada, Raymundus Bena, mengatakan, kebijakan atau langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan pemerataan tenaga pengajar antara sekolah negeri dan sekolah swasta di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.

Pernyataan Raymundus ini dilakukan saat menerima petani dalam acara penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian RI di Kantor Bupati Ngada, Selasa (9/6).

Menurutnya, selama ini terdapat aspirasi masyarakat yang menilai penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih terkonsentrasi di sekolah negeri, sementara sejumlah sekolah swasta masih mengalami kekurangan guru.

“Ada suara dari bawah yang

menilai tenaga PPPK terkesan menumpuk di sekolah negeri. Karena itu saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan BKSDM untuk memetakan kebutuhan guru. Jika ada sekolah swasta yang tidak memiliki guru sama sekali atau mengalami kekurangan guru, maka akan kita isi,” ujar Raymundus Bena.

Bupati menjelaskan, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik agar distribusi guru dapat dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan setiap sekolah.

“Data yang ada di meja saya menunjukkan sekitar 160 guru sedang dalam proses penataan. Saat ini masih terdapat sekolah yang rasio jumlah guru dan muridnya tidak seimbang,” katanya.

Selain fokus pada pemerataan tenaga pendidik, Pemkab Ngada juga terus melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya melalui pemberian Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Daerah,

kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, serta program bantuan seragam sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Raymundus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan dukungan melalui program revitalisasi sejumlah gedung sekolah di Kabupaten Ngada.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada pemerataan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ngada secara resmi menerima bantuan Alsintan pra panen dari Kementerian Pertanian RI yang disalurkan melalui Tani Merdeka Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, di halaman Kantor Bupati Ngada. (cha)



SOSIALIASI - Warga calon pelanggan di Desa Golo Kantar mengikuti sosialisasi Pengaktifan dan manajemen pemanfaatan bagi calon pelanggan baru AMB UPTD-SPAM Kabupaten Manggarai Timur.

Gunakan Air Bersih Secara Bijaksana

■ UPTD SPAM Layani 294 Pelanggan Baru

BORONG, PK - Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah-Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), menggelar Sosialisasi Pengaktifan dan manajemen pemanfaatan bagi 294 calon pelanggan baru Air Minum Bersih (AMB). Kegiatan itu dilakukan di Aula Kantor Desa Golo Kantar di Jawang, Kecamatan Borong, Matim, Selasa (9/6).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Matim, Tarsisius Sujur. Turut hadir anggota DPRD Matim dari Komisi C Rikardus Rungat dan Mikael Nardi, pimpinan Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala UPTD-SPAM Matim Fransiskus Yun Aga bersama staf, Kepala Desa Golo Kantar bersama staf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai pelanggan.

Tarsisius mengatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya Pemkab Matim untuk memastikan bahwa sarana dan jaringan air minum yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kehadiran layanan air minum bukan hanya soal tersedianya air di rumah-rumah warga, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Raymundus menegaskan, Pemkab Matim melalui UPTD SPAM terus berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini karena menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengaktifan, hak dan kewajiban pelanggan. Berikutnya, bagaimana mekanisme pembayaran rekening air, serta tata cara penyampaian pengaduan pelayanan,” katanya.

Raymundus juga menekankan agar Infrastruktur air minum yang telah dibangun dengan menelan biaya yang tidak sedikit itu merupakan aset umum. Karena itu, Masyarakat harus menjaga dan merawat bersama. Keberlanjutan pelayanan air minum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau UPTD SPAM semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Tarsisius mengajak seluruh masyarakat Desa Golo Kantar untuk menggunakan air secara bijaksana. “Kita hindari pemborosan, jaga kebersihan sumber air, serta merawat seluruh jaringan dan fasilitas yang telah tersedia. Jangan

melakukan tindakan yang dapat merusak pipa, meter air, maupun fasilitas pelayanan lainnya. Apabila ditemukan kerusakan atau gangguan pada jaringan air minum, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat,” pesannya.

Seluruh pelanggan diminta menjadi pelanggan yang tertib, membayar rekening air tepat waktu, mematuhi ketentuan pelayanan yang berlaku, dan menjalin komunikasi yang baik dengan UPTD SPAM. Sehingga pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“UPTD-SPAM untuk buatkan admin, sehingga kalau ada pengaduan dari pelanggan dikomunikasikan secara baik ke dalam agar bisa diatasi,” katanya.

Kepala UPTD-SPAM Matim, Fransiskus Yun Aga, menjelaskan tentang jumlah peserta calon pelanggan AMB Desa Golo Kantar. Menurut Aga, ada 294 pelanggan, dengan rincian 288 calon pelanggan aktif dari Kampung Jawang berjumlah 194 calon pelanggan, Tado berjumlah 54 calon pelanggan, dan Kampung Kampas berjumlah 40 calon pelanggan. Sedangkan empat calon pelanggan tidak aktif karena rumah tidak dihuni/pemilik rumah merantau.

Anggota DPRD Matim, Rikardus Rungat menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Matim yang sudah menyediakan air bersih bagi masyarakat di Desa Golo Kantar. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk perhatian serius dari Pemkab Manggarai bersama DPRD Matim untuk melayani masyarakat.

Karena itu, Rikardus juga berharap agar masyarakat Desa Golo Kantar dapat menjaga fasilitas umum air bersih yang telah dibangun itu. Rikardus juga meminta kepada UPTD-SPAM agar bisa membuatkan admin guna menjadi sarana untuk pengaduan bagi pelanggan.

Tokoh Masyarakat Desa Golo Kantar, Martinus Madi, mengatakan, selama belasan tahun mereka merindukan akan air minum bersih. Mereka hanya menggunakan air dari saluran irigasi untuk kepentingan minum, mandi dan cuci.

“Kehadiran air bersih ini, tentu kami sangat bangga dan menyampaikan terima kasih untuk Pemda Manggarai Timur karena telah menghadirkan air bersih untuk kami di Desa Golo Kantar ini. Sebab, selama belasan tahun kami merindukan air minum bersih ini setelah air yang dibangun oleh pihak swasta kalah itu,” ujar Martinus, diamini warga lainnya. (rob)

Sampah Dijadikan Produk Bernilai

● Diolah PHC Labuan Bajo

LABUAN BAJO - Padahar Heritage Conservation (PHC) akan mengolah sampah hasil pemilihan di Pulau Padar menjadi produk yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Demikian dikatakan Humas PHC, Yoanna Daely, melalui keterangan kepada Pos Kupang, Senin (8/6). Yoanna mengatakan, saat ini sampah yang dikumpulkan PHC di Padar sudah mencapai 8,5 Ton. Sampah-sampah yang belum dipilah itu didominasi oleh sampah plastik.

“Kami terus berupaya mencari solusi agar sampah yang telah terkumpul tidak lagi berakhir sebagai limbah, melainkan dapat diolah menjadi produk yang bernilai guna dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Yoanna, PHC telah berkomunikasi bersama Komodo Water yang telah berhasil menghasilkan produk bernilai ekonomis dari pengolahan sampah plastik. PHC berharap melalui kerjasama



POS KUPANG/PETROS CHRISANTUS GONSALES

SAMPAH - Sampah di Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, dikumpulkan oleh tim PHC Labuan Bajo.

dengan kelompok pemerhati lingkungan di Labuan Bajo.

“Produk yang kami harapkan dari hasil pengolahan sampah adalah produk yang memiliki nilai guna, nilai ekonomi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutur Yoanna.

Dirinya mencontohkan, sampah plastik dapat diolah menjadi ecobrick, paving block, atau produk seperti gantungan kunci atau tatakan

gelas. Atau misal sampah residu yang dapat diubah menjadi bahan bakar yang nantinya dapat kembali digunakan untuk kebutuhan operasional nelayan.

“Yang terpenting, kami ingin memastikan bahwa sampah yang terkumpul tidak kembali menjadi beban lingkungan, tetapi dapat masuk ke dalam siklus pemanfaatan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (moa)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG ATAMBUA

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Atambua, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap barang-barang agunan debitur atas nama sebagai berikut:

1. Dies Susianawati
(1) satu paket terdiri atas 2 (dua) bidang tanah, yakni sebidang tanah seluas 223 m² berikht bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01/239-Desa Kamanasa, atas nama **Semuel Achitofel Fahik**, terletak di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Belu) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebidang tanah seluas 203 m² berikht segala sesuatu yang melekat di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01/502-Desa Kamanasa, atas nama **Semuel Achitofel Fahik**, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Belu) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Harga Limit Lelang : Rp. 450.000.000.-
Uang Jaminan Lelang : Rp. 45.000.000.-

2. Dies Susianawati
Sebidang tanah seluas 500 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 496/Kamanasa atas nama **Dies Susianawati**, terletak di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Belu), Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Harga Limit Lelang : Rp. 300.000.000.-
Uang Jaminan Lelang : Rp. 30.000.000.-

PERSYARATAN LELANG:

- Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada alamat domain lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat domain tersebut.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensi biaya serungkak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan / pemilik lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Kupang dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Atambua.
- Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Atambua, nomor telepon (0389)22054 / 081338644445, dan KPKNL Kupang nomor telepon (0380) 825120.

PELAKSANAAN LELANG:

- Cara penawaran : Open Bidding (dengan mengakses alamat domain lelang.go.id)
Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026.
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : **Dies Susianawati** : 24 Juni 2026 (Pukul 09.20 WIB-Serial Waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Pelomoran harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
Bes Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang.
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang GRN Kupang Lantai 4, Jl. Frans Seda, Kota Kupang.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

KETERANGAN:
Nominal Jaminan yang disetor ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang dinyatakan. Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Kupang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Atambua, 10 Juni 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kantor Cabang Atambua



Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Kepala BPN

● Kasus Mafia Tanah di Manggarai Barat

LABUAN BAJO – Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat (Mabar) berkomitmen mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah yang melibatkan seorang pengusaha lokal berinisial S (50). Kini, penyidik Tengah menjadwalkan ulang pemeriksaan Kepala BPN Mabar yang sebelumnya, mangkir dari pemeriksaan.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan resmi dari seorang warga bernama Frans Subur (59). Guna memastikan proses hukum berjalan objektif dan terang benderang, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mabar menjadwalkan pemeriksaan terha-



POS KUPANG/HUMAS POLRES MANGGARAI

LUFTHI DARMAWAN - Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya.

dap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar.

Kapolres Mabar, AKBP Christian Kadang, melalui Kasat Reskrim AKP Lufthi Darmawan Aditya, menegaskan bahwa kehadiran institusi negara seperti BPN sangat krusial untuk memberikan kejelasan administratif.

“Agenda pemeriksaan ini ditujukan untuk mengklarifikasi mekanisme administratif pengembalian dokumen permohonan sertifikat tanah milik pelapor yang diduga cacat

prosedur,” ujar Lufthi, saat dikonfirmasi Senin (8/6) malam.

Perkara ini bermula pada April 2022. Saat itu, pelapor Frans Subur (59) bersama perwakilan dari pihak S (50), yakni EG dan K, menyusun draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJJB) di Kantor Notaris Selvi Hertono. Namun, karena pengusaha S (50) berhalangan hadir, draf tersebut baru ditandatangani secara sepihak oleh Frans Subur sebelum diserahkan kepada pihak S (50).

Kejanggalan mulai terendus pada Juli 2025. Frans Subur

(59) mengajukan permohonan peralihan hak jual beli atas sebidang tanah bersertifikat miliknya yang berlokasi di Boe Batu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Mabar.

Pihak BPN Mabar menerima surat keberatan dari kuasa hukum S (50) yang melampirkan dokumen PJJB. Dokumen tersebut diduga kuat telah diubah secara sepihak tanpa sepengetahuan maupun persetujuan tertulis dari Frans Subur (59) sebagai pemilik sah.

Berlandaskan surat keberatan sepihak tersebut, pada Agustus 2025, pihak BPN Mabar menghimbau berkas permohonan peralihan hak milik milik Frans Subur (59). Proses pengembalian ini diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme dan regulasi pertanahan yang berlaku.

“Tindakan sepihak ini mendorong pelapor menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polres Manggarai Barat. Kami hadir untuk menanggapi aduan tersebut demi menjamin keadilan bagi masyarakat,” jelas Lufthi. (moa)

Rivel Sila dan Roy Mali Siap Disidangkan

● Berkas Perkara Resmi Dilimpahkan

ATAMBUA, PK - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belu resmi telah melimpahkan berkas perkara pidana dua terdakwa Francisco Roy Christian Mali (Roy Mali) dan terdakwa Revival Adriano Sila (Rivel Sila) dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur ke Pengadilan Negeri Atambua.

Perkara yang dilimpahkan pada 8 Juni 2026 tersebut dijadwalkan mulai disidangkan, Kamis (18/6).

Pelimpahan berkas dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi melalui sistem digital dinyatakan lengkap oleh pihak pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri Belu melalui Kepala Seksi Intelijen, Budi Raharjo, SH, Se-

nin (8/6) malam, menjelaskan, proses pelimpahan berkas dilakukan melalui mekanisme penginputan dokumen secara elektronik menggunakan aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI.

Menurutnya, berkas perkara telah dikirim sejak (11/5) dan terekam dalam sistem sebagai bukti elektronik. Selanjutnya, berkas tersebut menjalani proses verifikasi oleh Pengadilan Negeri Atambua hingga dinyatakan lengkap.

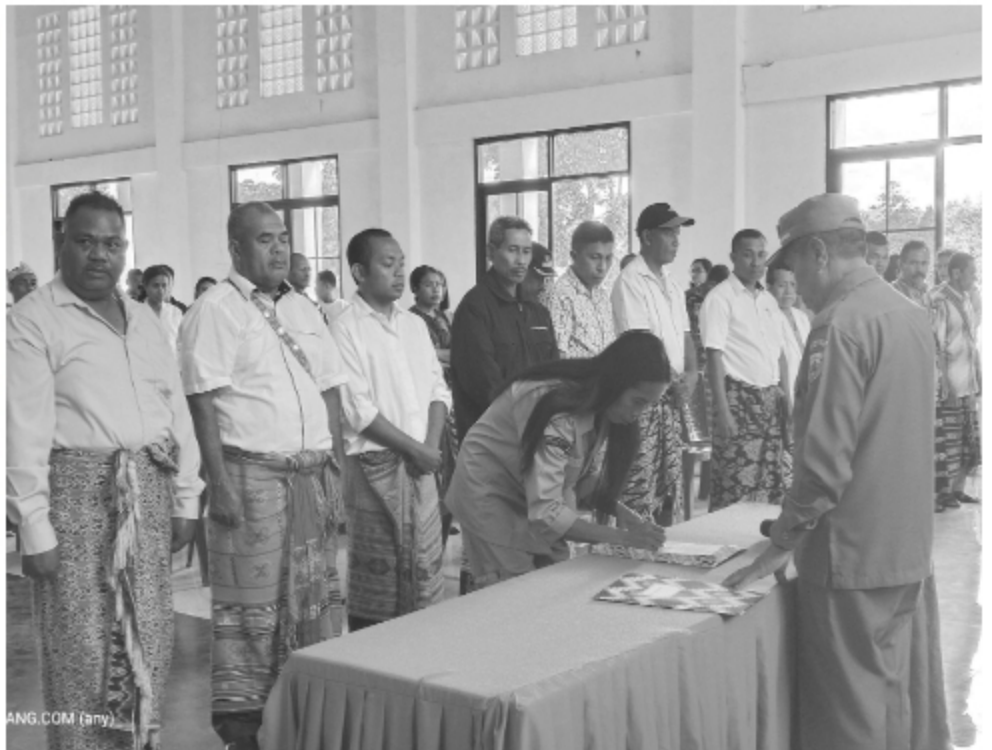
"Setelah dilakukan tahapan penginputan kelengkapan dokumen berkas perkara melalui aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI dan melalui proses verifikasi oleh Pengadilan Negeri Atambua,

maka serah terima pelimpahan berkas perkara pidana atas nama terdakwa Francisco Roy Christian Mali dan terdakwa Revival Adriano Sila telah selesai, Senin (8/6)," jelas Budi.

La menambahkan, kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Belu pada Januari 2026 lalu.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Belu juga telah menerima penetapan hari sidang pertama dari Pengadilan Negeri Atambua.

"Sidang perdana akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum," pungkasnya. (gus)



ANG.COM (any)

POS KUPANG/MARIA YANNEY GUNU GIDDER

PENGUKUHAN - Pengukuhan 21 kelompok Tani oleh Kadis TPHP Kabupaten TTS di GBKN, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Selasa (9/6).

Kadis TPHP Kukuhkan 21 Kelompok Tani

■ Perkuat Kemandirian Pangan di TTS

SOE, PK - Sebanyak 21 kelompok tani resmi dikukuhkan. Dari jumlah tersebut 20 kelompok pemula dan satu kelompok naik kelas menjadi kelompok Tani Madya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jacob Benu, secara resmi mengukuhkan para kelompok Tani, di Gereja Batu Karang Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Selasa (9/6).

21 kelompok Tani tersebut berasal dari Kecamatan Kota Soe, Amanuban Tengah, dan Amanuban Selatan, dengan total anggota sebanyak 286 anggota.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Kabupaten TTS, Albinus Kase, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten TTS, Zakarias AD Toto, Camat Kota Soe, dan pejabat dari Kecamatan Amanuban Selatan dan Amanuban Tengah, para penyuluh pertanian, serta kelompok tani di dikukuhkan.

Dalam pengukuhan ini, Kepala Dinas TPHP, Jacob Benu, mengatakan, jumlah kelompok Tani yang telah terbentuk tidak menjadi suatu ukuran, melainkan efektivitas dari setiap kelompok Tani yang perlu dikejar.

"Hari ini kita kembali mengukuhkan 21 Kelompok Tani.

Saya tegaskan bahwa kegiatan hari ini kita jangan melihat dari jumlah, tetapi dari efektivitas kegiatan kelompok Tani. Apakah dengan jumlah kelompok Tani yang ada sudah bisa mengoptimalkan potensi pertanian kita, tentu ini perlu kerja kita bersama," tegasnya.

La mengatakan, saat ini banyak bantuan dari pemerintah dalam peningkatan pertanian dan kemandirian pangan, sehingga melalui kelompok Tani yang produktif akan berkeseimbangan memperoleh bantuan-bantuan tersebut.

Jacob mendorong para penyuluh pertanian dapat turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan para petani. Pasalnya banyak ditemukan para petani yang tidak mengenali penyuluh pertanian di desa ataupun Kecamatan masing-masing.

"Saya harap para penyuluh juga turun ke lapangan, karena banyak petani yang tidak kenal dengan penyuluh pertanian. Mari kita sama-sama meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten TTS," ungkapnya.

Selain itu, Anggota DPRD TTS Daerah Pemilihan Kota Soe, Albinus Kase menyam-

bertani ini identik dengan masyarakat Timor. Saya berharap ada pemberdayaan berkelanjutan bagi para kelompok Tani baik itu pengelolaan kelompok tani, buat pupuk dan sebagainya," tekannya.

Menurutnya, pendampingan kelompok tadi harus terus berlanjut, sehingga tidak meninggalkan kesan setelah dibentuk kemudian dibiarkan.

"Kelompok Tani harus diperkuat. Saya berterima kasih kepada Kadis, tim kerja dan penyuluh yang telah membantu sehingga hari ini sudah kukuhkan 21 kelompok, semoga ketahanan pangan di kabupaten TTS boleh terus ditingkatkan," tegasnya.

Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten TTS, Zakarias AD Toto, menyampaikan agar kelompok Tani dapat terus berkembang agar bisa mewujudkan kemandirian pangan.

"Kami profesiati kepada 21 kelompok yang dikukuhkan, semoga semangat bapak mama tidak tergerus, karena melihat kondisi hari ini kita masih dihadapkan dengan mengalami stunting, dan gejala dunia, maka itu kita harus tetap bekerja dalam kelompok, berkegiatan dan bertumbuh sampai pada kemandirian," jelasnya.

La mendorong agar kelompok Tani melihat berbagai

bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, agar menjadi stimulan untuk peningkatan kemandirian petani. Selain itu bahwa kelompok tani telah dilindungi oleh UU sehingga tidak perlu cemas, namun bekerja dengan tekun.

"Kami menyampaikan hal ini, ketika kita didalam kelompok tidak berpikir macam-macam, kita bekerja dengan tenang karena negara melindungi dan menjamin kita," tegasnya.

La menyampaikan bahwa kelompok Tani mengenal 3 fase, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Ada tahapan naik kelas dalam pengembangan.

Kelas madya merupakan kelompok yang sudah mandiri. Bahwa semakin keatas tingkatannya ketergantungan semakin berkurang atau semakin swadaya dan mandiri.

Dengan pengukuhan 21 Kelompok Tani ini, jumlah keseluruhan kelompok Tani di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi 4.014 kelompok Tani. 3.484 kelompok Tani kelas pemula, 472 kelas lanjut dan 58 kelas Madya. Dengan total anggota kelompok Tani sebanyak 68.356 petani.

Pengukuhan ditandai juga dengan peresmian kelompok tadi dengan membuka papan nama masing-masing kelompok Tani. (any)

Kejari Belu Selidiki Dugaan Korupsi

● Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD

ATAMBUA, PK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Belu periode 2019-2024.

Pantauan Pos Kupang, di Kantor Kejari Belu, Selasa (9/6), dua mantan Kepala Sekretariat DPRD Belu berinisial AM dan SB diperiksa oleh jaksa pada bidang tindak pidana khusus.

Kepala Kejari Belu melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Cornelis S Oematan, SH, membenarkan proses penyelidikan tersebut.

"Bahwa benar saat ini Penyelidik Kejari Belu telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: PRINT-228/N.3.13/Fd.1/04/2026 tanggal 27 April 2026," ujarnya, saat ditemui Pos Kupang.



PK/AGUS TANGGUL

jelasnya.

Menurut dia, jumlah saksi yang dimintai keterangan masih berpotensi bertambah. "Dan, terkait permintaan keterangan terhadap para pihak kemungkinan akan bertambah," tambahnya.

Selain itu, penyelidik juga telah mengantongi puluhan dokumen.

"Bahwa dokumen yang telah diperoleh penyelidik sebanyak 63 dokumen termasuk pertanggungjawaban terkait belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024," ungkapnya.

Cornelis menegaskan, proses penyelidikan masih terus berjalan.

"Bahwa sampai saat ini penyelidikan masih berlanjut, dan terkait apakah ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, nanti hasil penyelidikan akan dilakukan ekspos dengan Aspidus Kejati NTT," pungkasnya. (gus)

La menjelaskan, hingga (9/6), penyelidik telah meminta keterangan dari 21 orang saksi. "Bahwa sampai dengan saat ini, tanggal 9 Juni 2026, Penyelidik telah melakukan permintaan keterangan dari 21 orang saksi, baik dari Inspektorat Belu, Sekretariat DPRD, dan beberapa mantan anggota DPRD serta dua orang anggota DPRD aktif,"

Yerem Nahak Hadirkan Kuliner Murah

● Di Pegunungan Rinhat

BETUN, PK - Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan upah kerja yang minim bagi kaum muda di Kabupaten Malaka, semangat berwirausaha menjadi jalan alternatif yang mulai dilirik sebagian generasi muda.

Salah satu sosok yang memilih jalur tersebut adalah Yerem Nahak, pemuda asal Desa Bone Tasea, Kecamatan Weliman, yang kini sukses menekuni usaha kuliner ikan bakar dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Berbeda dari kebanyakan anak muda seusianya, Yerem memilih meninggalkan profesi sebagai guru dan memulai usaha kuliner yang sederhana namun menjanjikan.

Kini, setiap sore ia melayani pelanggan di lapak miliknya yang diberi nama Ikan Bakar Sultan, yang berlokasi di Desa Biudukfoho, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

Lapak tersebut tampak sederhana. Hanya sebuah meja kayu dan tungku pembakaran yang dibuat dari beton dengan desain sederhana. Namun, dari tempat yang jauh dari kesan mewah itulah lahir cita rasa ikan bakar yang kini mulai dikenal dan digemari masyarakat Rinhat serta wilayah sekitarnya.

Aroma rempah-rempah yang khas langsung tercium ketika mendekati lapak tersebut. Bumbu racikan yang digunakan berasal dari rempah-rempah segar yang dibeli dari pasar rakyat.

Perpaduan bumbu tradisional dan teknik pembakaran yang tepat menghasilkan ikan bakar dengan aroma menggugah selera serta rasa yang meresap hingga ke dalam daging ikan.

Sebelum terjun ke dunia usaha, Yerem merupakan seorang guru Biologi di salah satu SMA swasta di Kecamatan Wewiku. Selama kurang lebih tiga tahun ia mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia melihat peluang lain yang dinilai mampu



IKAN BAKAR - Yerem Nahak saat sedang menyajikan ikan bakar di lapak Ikan Bakar Sultan miliknya yang berada di Biudukfoho, Kecamatan Rinhat, Malaka, Selasa (9/6).

memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus membuka sumber penghasilan yang lebih menjanjikan.

Keputusan besar pun diambil. Ia memilih berhenti mengajar dan fokus membangun usaha kuliner ikan bakar.

"Wilayah Rinhat ini berada di kawasan pegunungan. Sehingga membuat akses masyarakat terhadap ikan segar dari laut tidak semudah daerah pesisir. Kondisi ini mendorong saya untuk menghadirkan usaha kuliner yang menyediakan ikan bakar dengan harga terjangkau di wilayah tersebut," ujar Yerem saat ditemui Pos Kupang, Selasa (9/6).

Berangkat dari kondisi geografis tersebut, Yerem melihat adanya kebutuhan yang belum banyak terpenuhi. Masyarakat pegunungan yang jauh dari pantai tentu tidak selalu mudah mendapatkan ikan segar maupun olahan ikan berkualitas.

Melihat peluang itu, ia mulai merintis usaha Ikan Bakar Sultan pada awal Mei 2026. "Saya melihat masyarakat di daerah pegunungan juga berhak menikmati ikan bakar yang enak tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk akses ke wilayah pesisir," katanya.

Salah satu daya tarik utama usahanya adalah harga yang relatif murah. Jika di berbagai tempat ikan bakar sering diju-

al dengan harga yang cukup tinggi, Yerem justru menawarkan ikan bakar hanya sekitar Rp 50.000 per ekor.

Pilihan ikan yang disajikan pun cukup beragam, mulai dari ikan belang kuning hingga ikan cakalang berukuran besar yang segar. Meski dijual dengan harga terjangkau, kualitas rasa tetap menjadi prioritas utama.

Bumbu khas racikan Yerem menjadi rahasia kelezatan yang membuat pelanggan terus kembali. Banyak pelanggan mengaku ketagihan setelah mencicipi sajian tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang menilai cita rasa Ikan Bakar Sultan mampu bersaing dengan hidangan serupa yang dijual di kota-kota besar.

Nama Sultan yang disematkan pada usahanya ternyata memiliki filosofi tersendiri. Yerem ingin menghadirkan pengalaman menikmati hidangan istimewa layaknya seorang sultan, tetapi tetap dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Rasanya istimewa serasa Sultan, tetapi harganya tetap murah," ujarnya sambil tersenyum.

Untuk menjaga kualitas bahan baku, Yerem mendatangkan ikan segar langsung dari Kota Kupang. Ia memesan ikan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba yang kemudian dikirim menggunakan jasa travel menuju Malaka. (ito)

Berkas Perkara Dugaan Pencabulan Anak Masih Diteliti

KEFAMENANU, PK - Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), AKBP Eliana Papote, melalui Kasi Humas Polres TTU, AKP Anselmus Pera, mengatakan, saat ini berkas perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur di salah satu desa di Kecamatan Insana, masih diteliti Jaksa Peneliti Kejari TTU. Beberapa waktu lalu, Polres TTU sudah melimpahkan berkas perkara itu ke Kejari TTU.

Saat ini, penyidik Polres TTU sedang menanti hasil pemeriksaan berkas dari JPU. Sementara itu, dalam penanganan kasus ini, sebanyak tiga orang saksi telah diperiksa oleh tim penyidik.

"Berkasnya masih di kejaksan," ungkapnya, Senin (8/6).

Beberapa waktu lalu, Kasubsi PIDM Humas Polres TTU, Aipda Akmal, mengatakan, Polres TTU telah mengamankan surat permohonan sidik, dan melakukan visum et repertum.

Selanjutnya, kata Akmal, aparat kepolisian langsung



BEKUK TERSANGKA - Pihak kepolisian Unit PPA Satreskrim Polres TTU (kiri dan kanan) usai membekuk tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak berinisial LM (tengah), Minggu (3/5).

Menurutnya, usai laporan dari keluarga korban, pihak kepolisian langsung menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.

Setelah itu, kata Akmal, aparat kepolisian langsung

meminta keterangan tiga orang saksi. Selanjutnya, aparat kepolisian menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.

La menjelaskan, modus tersangka melancarkan

aksi pencabulan tersebut yakni sengaja mengajak anak korban untuk mencari uban setelah itu memberikan uang. Tersangka juga mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kejadian perkara ke pihak keluarga.

Tersangka disangka melanggar pasal 473 ayat 3 huruf c jo pasal 473 ayat 4 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Mapolres TTU.

Sebelumnya, Seorang pria berinisial LM (56) diduga mencabuli anak Mawar (10) di salah satu desa di Kecamatan Insana.

Aksi bejat LM ini terkuak setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada seorang saksi atau keluarganya berinisial MS.

Saksi MS kemudian melaporkan kejadian yang dialami korban ke SPKT Polres TTU pada Minggu (3/5) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. (bbr)



WORKSHOP - Workshop Penguatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Berbasis Rumah Ibadah di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Senin (8/6).

Rumah Ibadah Jadi Garda Depan

● Peringatan Dini Bencana di Kabupaten Kupang

OELAMASI, PK - Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Salah satunya melalui Workshop Penguatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Berbasis Rumah Ibadah yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, mewakili Bupati Kupang, Yosef Lede, di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Senin (8/6).

Mateldius mengatakan, rumah ibadah memiliki peran strategis sebagai pusat penyebaran informasi, edukasi kebencanaan, serta penguatan nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.

"Rumah ibadah memiliki kekuatan besar sebagai pusat penyebaran informasi, edukasi kebencanaan, serta penguatan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu ketika sistem peringatan bencana dibangun berbasis rumah ibadah, maka informasi tentang potensi bahaya bencana dapat lebih cepat diterima masyarakat dan mendorong tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat," ujarnya.

Menurut Mateldius, sistem peringatan dini tidak hanya berbicara tentang perangkat dan teknologi, tetapi juga bagaimana informasi dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.

"Sistem peringatan ini bukan hanya tentang alat dan teknologi, tetapi menyangkut bagaimana informasi dapat sampai kepada penerima pesan pada waktu yang tepat dan mudah dipahami. Apalagi melalui rumah ibadah selalu diajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama, kasih, solidaritas, dan semangat membantu sesama," katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, guna menciptakan daerah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga aman dan tangguh menghadapi bencana.

Mateldius berharap workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas rumah ibadah sebagai mitra pemerintah dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

"Dari workshop ini diharapkan akan memperkuat kapasi-

tas rumah ibadah sebagai mitra pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana, meningkatkan pemahaman para pemuka agama dan pengelola rumah ibadah tentang langkah-langkah mitigasi dan respons awal terhadap bencana, serta membangun jaringan komunikasi yang cepat dan efektif antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas keagamaan," jelasnya.

Workshop tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang Noflianto Amtitan, Manager Obor Berkat Adelia Simatupang, perwakilan BMKG Provinsi NTT Helny Willa, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang Elvrid Saneh, Camat Kupang Barat, Camat Takari, anggota FKUB, serta tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kupang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan melibatkan rumah ibadah sebagai pusat informasi dan koordinasi dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Kabupaten Kupang. (nov)

Kemenag Ronda Tertibkan BMN dari ASN



TARIK - Kasubag TU Kemenag Rote Ndao, Nakir Kolloh, didampingi anggota UAKPB, Krend Bolla dan Adrian Paceli tarik BMN yang digunakan ASN, Selasa (9/6).

BA' A, PK - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rote Ndao (Ronda) melakukan penertiban, penarikan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berapakah bermotor sebelumnya digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor tersebut, Selasa (9/6).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi penyalahgunaan aset negara sekaligus memastikan pengelolaan BMN berjalan secara transparan, tertib dan akuntabel.

Kegiatan penertiban dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Koordinator Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kabupaten Rote Ndao, Nakir Kolloh, didampingi anggota UAKPB, Krend Bolla dan Adrian Paceli.

Penertiban mencakup penarikan dan pengembalian fisik

kendaraan dinas roda dua serta laptop, sekaligus penatausahaan dokumen administrasi aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Nakir Kolloh, pengembalian BMN tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan integritas ASN dalam menjaga amanah negara.

"Lebih dari sekadar kewajiban administratif, pengembalian BMN berupa laptop dan kendaraan roda dua ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan integritas sebagai abdi negara," tuturnya.

Ia menambahkan, aset negara adalah amanah yang harus dijaga bersama demi mendukung kelancaran pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Nakir mengapresiasi kesadaran para ASN yang mengembalikan aset negara secara

ra sukarela.

"Sikap ini mencerminkan pemahaman terhadap aturan serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepatuhan hukum. Kami mengapresiasi ASN yang telah mengembalikan BMN kepada Kuasa Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan dan penggunaan aset negara," ucapnya.

Ia menerangkan, penertiban BMN tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan BMN, Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta sejumlah regulasi terkait pengelolaan dan pengamanan BMN.

Proses penarikan dan pengembalian aset dilakukan secara resmi melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan pendokumentasian sesuai prosedur yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, kata dia, Kemenag Kabupaten Rote Ndao menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola BMN yang transparan, akuntabel, dan tertib administratif.

Dengan pengelolaan aset yang baik, seluruh BMN juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (rio)

Badan Keuangan Bayar Gaji PPPK PW

■ Terbanyak untuk Guru

KUPANG, PK - Badan Keuangan Provinsi NTT telah melaksanakan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu (PW). PPPK Paruh Waktu tersebar di 20 organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan Pemrov NTT, Benhard Menoh, kepada Pos Kupang, Selasa (9/6), mengatakan, jumlah PPPK Paruh Waktu sebanyak 702 orang. Dari jumlah itu, satu orang meninggal dunia dan empat orang mengundurkan diri.

"Secara tagihan untuk pembayaran sudah masuk semua. Kami sudah proses pembayaran terhitung sejak tanggal 3 Juni 2026," kata Benhard.

Dia mengatakan, paling banyak PPPK Paruh Waktu merupakan guru atau berjumlah 539 orang. Menurut dia, pembayaran itu terus dilakukan mengikuti kelengkapan administrasi dari masing-masing PPPK Paruh Waktu. "Sesuai aturan pembayaran LS itu dua hari setelah diterima," katanya.

Dia menjelaskan, keterlambatan itu terjadi karena administrasi dari masing-masing OPD. Sebab, ada penilaian dan membutuhkan melengkapinya semua syarat oleh PPPK Paruh Waktu.

Benhard juga melaporkan pembayaran gaji khusus untuk guru dilakukan untuk bulan Januari hingga April 2026. Sedangkan PPPK selain guru dibayar untuk bulan April dan Mei 2026.

"Yang kami bayar saat ini

Januari sampai April sesuai kelengkapan administrasi. Mei-Juni masih ada waktu," katanya.

Benhard menyampaikannya total anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 3,7 miliar atau Rp 12 miliar untuk satu tahun.

Selain itu, Benhard juga mengumumkan adanya pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 bagi PNS. Total PNS Pemrov NTT sebanyak 24

Pemrov NTT saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pembayaran.

Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 32 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 yang ditargetkan dapat cairkan pada Juni 2026.

Meski anggaran telah tersedia, proses pembayaran masih menunggu terbitnya regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran gaji ke-13 berbeda dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Gaji ke-13 diberikan sebesar satu kali penghasilan sesuai daftar gaji yang berlaku, dengan dasar perhitungan menggunakan daftar gaji bulan Mei.



Benhard Menoh

"Gaji ke-13 itu pada prinsipnya sebesar satu kali gaji. Dasarnya adalah daftar gaji bulan Mei dan dibayarkan pada bulan Juni," katanya.

Data Kepegawaian Pemrov NTT per Januari hingga Maret 2026, ASN sebanyak 30.243 orang, PNS, 11.729 orang, CPNS sebanyak 1.381 orang, PPPK sebanyak 12.424 orang, PPPK Paruh Waktu sebanyak 4.536 orang, Kesehatan, 66 orang, Teknis 988 orang, Guru: 3.482 orang. Belanja pegawai Pemrov NTT saat ini sebesar Rp 2,14 triliun dari total APBD Rp 5,17 triliun.

Realisasi PAD 19,9 Persen

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pemrov) NTT baru 19,99 persen per 5 Juni 2026 atau setara dengan Rp 400 miliar lebih. Risikonya, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Dari angka itu kita terus dorong supaya peningkatan PAD," kata Kepala Badan Keuangan Pemrov NTT Benhard Menoh, Selasa (9/6).

Dia mengatakan, sistem pelaporan saat ini tidak hanya angka umum. Namun, telah dijabarkan secara lebih rinci.

Misalnya, target PAD retribusi penggunaan aula yang berada di Biro Umum.

"Datanya siapa yang bertanggung jawab. Bukan Kepala Biro Umum. Kita mendeteksi sampai situ, siapa yang bertanggung jawab pemakaian aula, nomor handphone, sehingga pemantauan lebih mudah," ujarnya.

Hal itu juga untuk memberi peran bagi semua pegawai Pemerintah dalam peningkatan PAD. Menurut Benhard, Pemerintah juga telah membentuk optimalisasi PAD yang ia sendiri menjadi Ketua pelaksana dan beranggotakan 50 pegawai. "Setiap Jumat, pukul 17.00 kita data realisasi PAD," katanya.

Benhard mengaku, data yang masuk kemudian diurutkan berdasarkan OPD dengan realisasi PAD paling tinggi. Saat ini, BPSMD telah merealisasikan PAD lebih dari 100 persen dan paling rendah ada di DLHK 3,88 persen.

"Total realisasi pendapatan adalah 32,21 persen dan belanja 30,43 persen," tambah dia.

Benhard berharap sisa enam bulan dalam tahun 2026 ini, target PAD Rp 2,8 triliun bisa tercapai. Dia menyebutkan ada kendala yang dihadapi dalam optimalisasi PAD. Salah satunya mengenai revisi Perda Pajak dan Retribusi.

"Revisi itu kan kalau tidak salah baru di Perda-kan di bulan Mei atau April. Menjadikan sedikit melambat. Didalam Pergub itu masih umum," katanya. (fan)

Dosen Magister Sosiologi

- Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si.
- Prof. Dr. Sandi Maryanto, M.Pd.
- Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S.
- Prof. Dr. Ishomudin, M.Si.
- Dr. Ahmad Atang, M.Si.
- Dr. Baco Tang, M.Si.
- Dr. Syarifuddin Darajad, M.Hum.
- Dr. Wahid Hasyim, M.Si.
- Dr. Zulhaedir Abdussamad, M.Si.
- Dr. Srevarius Tamanob, M.Si.
- Dr. Arifin Djenawa, M.Pd.
- Dr. Siti Syahida Nurani, S.H., M.Hum.
- Dr. Rahmat Laan, M.M.
- Dr. Syarifudin, S.E., M.M.

Daftar Online SEKARANG
admi.umkoe.ac.id

Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III
01 Januari - 18 April 2026	20 April - 20 Juni 2026	22 Juni - 18 Sept. 2026

0852 5344 7236
0813 3713 9690

J. K.H. Ahmad Dahlan No.17
Kupang, NTT
umkoe.ac.id

ADMISI 2026
MAHASISWA BARU

Syarat Pendaftaran

- Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia
- Fotocopy Transkrip Nilai Terlegalisir 2 Lembar
- Fotocopy Ijazah S-1 Terlegalisir 2 Lembar
- Menyerahkan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 Lembar beserta softfile dalam CD/flashdisk
- Fotocopy KTP/identitas diri
- Surat ijin/tugas belajar dari instansi tempat bekerja (khusus bagi pendaftar yang telah bekerja)
- Membayar uang pendaftaran bagi mahasiswa baru sebesar Rp. 500.000,- dan SPP sebesar Rp. 6.500.000,- per semester (dapat diangsur)

Biaya Studi

Uraian Biaya	Lunas (Rp)	Cicil (Rp)
1. Pendaftaran	500.000	500.000
2. Sumbangan Biaya Pendidikan	6.500.000	3.250.000
3. Materi Kuliah	1.000.000	1.000.000
4. Kartu Tanda Mahasiswa	100.000	100.000
5. Perpustakaan	250.000	250.000
6. Jns Akomodasi	500.000	500.000
Total Biaya	8.850.000	5.600.000

Nomor Rekening:
Rector Universitas Muhammadiyah Kupang
BN: 2025200432

CP. Panitia PMB:
Ibu Arini Marhaeni
0852 5344 7236

Bulog NTT...

● Sambungan hal 1

K. Kanam mengatakan, program SPHP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di wilayah NTT.

“Penyaluran Bantuan Pangan dan beras SPHP dilakukan secara bersamaan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga

yang terjangkau. Kombinasi kedua program ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Arrahim menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras pemerintah. Menurutnya, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog Kanwil NTT saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Bulog memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang kami kelola saat

ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Kami akan terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung ketahanan pangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” tambahnya.

Bulog Kanwil NTT juga menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga di daerah. (uan)

Pengangguran...

● Sambungan hal 1

bersama yang harus segera diatasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan berbagai peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia mengapresiasi kolaborasi antara Universitas San Pedro Kupang dan GIZ Jerman Indonesia yang dinilai menjadi langkah strategis dalam membuka akses informasi, meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI), serta memperluas peluang kerja yang aman, legal, dan bermartabat bagi generasi muda NTT.

Suratmi menjelaskan, NTT hingga kini masih menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar. Namun, sekitar 90 persen penempatan pekerja migran asal NTT masih berada pada sektor domestik. Selain itu, negara tujuan penempatan, khususnya Malaysia, masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dasar.

“Sekitar 75 persen pekerja migran yang ditempatkan ke Malaysia berpendidikan se-

kolah dasar. Penempatan juga masih banyak didominasi perempuan, terutama ibu-ibu,” jelasnya.

Suratmi juga menyoroti pola pikir sebagian generasi muda NTT yang dinilai masih enggan keluar dari zona nyaman dan kurang berupaya meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Menurutnya, persaingan kerja saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ijazah, melainkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

“PR anak muda NTT yang pertama adalah gengsi. Terlalu nyaman di zona nyaman dan tidak mau belajar. Dunia kerja hari ini mencari kompetensi, bukan sekadar ijazah,” tegasnya.

Ia mengaku prihatin karena banyak peluang karier yang justru diisii oleh tenaga kerja dari luar NTT. Bahkan, pada penerimaan pegawai di sejumlah instansi vertikal tahun 2026, sebagian besar posisi berhasil diraih oleh peserta dari luar daerah.

“Tahun ini yang lulus PNS di instansi vertikal sekitar 90 persen diisii oleh anak-anak luar NTT. Bahkan di tempat saya sendiri tidak ada satu

pun anak NTT yang lulus. Kenapa? Karena yang diuji adalah kompetensi. Kalau kita hanya mengandalkan ijazah tanpa kemampuan, maka kita akan menjadi tamu di rumah sendiri,” ujarnya.

Karena itu, Suratmi mengajak generasi muda NTT untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menguasai keterampilan baru, dan berani memanfaatkan berbagai peluang kerja yang tersedia, termasuk peluang kerja formal di luar negeri.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat NTT mampu bersaing dan memperoleh pekerjaan yang lebih layak serta berpenghasilan lebih baik.

Suratmi berharap melalui sosialisasi tersebut, masyarakat NTT semakin memahami pentingnya migrasi yang aman serta mampu memanfaatkan peluang kerja di sektor formal, sehingga kualitas penempatan pekerja migran asal NTT dapat terus meningkat.

“NTT harus naik kelas. Kita harus bergerak dari dominasi sektor domestik menuju semakin banyak penempatan pada sektor formal yang lebih profesional dan menjanjikan,” pungkasnya. (uge)

DPRD Minta...

● Sambungan hal 1

tapan tersangka di jajaran BGN sebelumnya menjadi cerminan dan evaluasi bagi NTT,” ujarnya.

Persoalan yang terjadi di level pusat pada bekas pejabat BGN, kata dia, memang adanya penghentian sementara. Namun, David mendorong layanan itu kembali terlaksana. Apalagi selama ini pelajar telah terbiasa mendapat BGN.

“Secapatnya bisa dibenahi dan pelayanannya kembali,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD NTT itu juga mendukung adanya wacana agar pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG. Akan tetapi, kantin yang ada perlu mengikuti standar pelayanan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

David berharap pelaksanaan program MBG di NTT mengikuti aturan dan petunjuk teknis serta mengikuti tahapan yang ada. Ia juga mengingatkan adanya pelibatan bagi petani lokal, terlebih pada pemenuhan bahan baku untuk dapur MBG.

“Dengan persoalan di tingkat pusat kita tidak terpengaruh, kita tetap konsisten, melakukan evaluasi untuk ketika ada pelayanan kembali, atau sementara berjalan, kita maksimalkan agar terwujud sesuai

harapan,” ujarnya.

Diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah dapur MBG di NTT menghentikan pelayanan ke sekolah-sekolah. Alasannya karena operasional distribusi tidak tersedia. Kebijakan ini muncul pasca penahanan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua pimpinan BGN lainnya.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi NTT, Oswaldus Ngali belum merespons pesan yang dikirim. Pekan lalu, Oswaldus mengaku akan memberi keterangan usaha menghadiri kegiatan di Jakarta.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyatakan dukungan-nya terhadap langkah pemerintah melakukan pembenahan di jajaran pimpinan program MBG. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan terhindar dari berbagai persoalan di lapangan.

Fokus utama pemerintah saat ini, kata dia, adalah memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga, distribusi berjalan tepat sasaran, serta tidak terjadi kasus yang dapat merugikan masyarakat, termasuk keracunan makanan.

“Perbaiki di jajaran pimpinan ini tetap dalam konteks memperbaiki tata kelola, me-

astikan makanan yang diberikan berkualitas, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” kata Melki.

Terkait kemungkinan adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG di daerah, termasuk di NTT, Melki meminta semua pihak untuk menunggu proses yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada fakta hukum yang jelas.

Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia menyerahkan itu ke para pihak yang berwenang.

“Kalau ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, tentu harus dibuktikan secara hukum. Kita serahkan kepada aparat dan lembaga yang berwenang untuk bekeja,” katanya.

Waketus DPP Golkar itu berharap jajaran pimpinan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sehingga MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Yang paling penting adalah bagaimana program ini berjalan baik, makanan dibagikan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya. (fan)

lagi” gitu kan,” kata Marcella.

Marcella pernah menjadi salah satu sutradara dalam proyek film omnibus Malikat Tanpa Sayap, yang melibatkan lima sutradara perempuan dan juga la produseri sendiri. (tribunnews)

Ditantang Rekan...

● Sambungan hal 1

kembali menyutradarai proyek layar lebar.

“Iya banget (baik jadi sutradara), sebenarnya aku pengen

Undana Buka...

● Sambungan hal 1

pembayarannya. Jadi mohon berhati-hati untuk semua teman-teman Undana untuk tidak mempercayai pihak ketiga manapun,” tegasnya.

Christin menjelaskan, untuk PPDS Obygn dibuka sebagai empat orang per semester dan dibuka dua kali setahun. Sedangkan untuk PPDS Anestesi dan Terapi Intensif dibuka kuota untuk tiga orang per semester, juga dibuka dua kali setahun.

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan dokter spesialis juga sangat terjangkau, karena menurut dr. Christina, selain bersaing mutu pendidikan, FKHH Undana juga bersaing biaya pendidikan.

“Untuk SPP ada dua kategori, kategori 1 Rp15 juta per semester, kategori 2 Rp17 juta

per semester. Sedangkan biaya sumbangan Iuran Pembinaan Institusi (IPI) sebesar Rp 70 juta,” ungkapnya.

Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang NTT, dr. Erma Rantela’bi, Sp.O.G dalam kesempatan yang sama mengatakan, dokter spesialis obygyn di masih provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat dibutuhkan.

“Kalau untuk Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kebutuhan dokter spesialis sudah mencukupi. Tetapi kalau kita melihat, Provinsi NTT daerah kepulauan, dimana ada beberapa pulau besar dan kecil sebagai suatu kabupaten, bahkan ada beberapa kabupaten yang memang hanya memiliki satu dokter spesialis obygyn. Dengan terbentuknya program pendidikan dokter spesialis SPI Obstetri dan Ginekologi di FKHH Undana

ini sangat bisa menjawab kebutuhan untuk lebih banyak lagi dokter spesialis yang ada di kabupaten-kabupaten di NTT,” kata dr. Erma.

Dia berharap, semakin banyak dokter spesialis obygyn yang bisa dihasilkan dari FKHH Undana dari program ini.

“Kita harapkan program ini boleh berlangsung dan mungkin tahun ini bisa menerima residen obygyn yang bisa melakukan pendidikan di FKHH Undana. Ini program yang sangat luar biasa untuk menjawab kebutuhan dokter obygyn yang saat ini memang masih dibutuhkan. Diharapkan satu kabupaten itu minimal dua sampai tiga dokter obygyn yang boleh bertugas di masing-masing kabupaten di NTT. Kalau dokter obygyn cuma satu terus tiba-tiba ada cuti atau urusan mendadak otomatis terjadi kekosongan pelayanan obstetri dan ginekologi di satu

SPPG...

● Sambungan hal 1

“Untuk sayuran kami masih mengandalkan pembelian di pasar, karena belum ada pemasok tetap dari masyarakat sekitar,” jelasnya.

Sela, demikian dia biasa disapa menyatakan, SPPG Manutun didukung dua unit mobil operasional untuk distribusi makanan. Kehadiran program ini dinilai turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja.

“Para karyawan menerima upah sebesar Rp 120 ribu per hari, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal,” tambahnya.

Program ini dijalankan bersama mitra Yayasan Peduli Timor Rana. SPPG Kota Atambua sendiri, kata Sela saat ini melayani sebanyak 2477 penerima manfaat yang terdiri dari empat PAUD, satu SD, dua SMP, satu SMA, serta delapan posyandu.

“Sejak mulai beroperasi pada 13 November 2025 lalu, kami didukung oleh 51 orang tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, satu ahli gizi, satu akuntan dan satu kepala SPPG,” pungkasnya.

Program MBG di SD Inpres Liliba, Kota Kupang juga mengalami penghentian operasional sementara pada hari ini, Selasa (9/6).

“Informasi yang kami terima dari dapur memang ada penghentian sementara. Hari ini anak-anak kami di SD Inpres Liliba, Kota Kupang, tidak terima MBG,” kata Kepala SD Inpres Liliba, Yohanes J. Tukan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (9/6).

Yohanes menyebut, walaupun sempat terhenti sehari, namun pihak sekolah telah menerima informasi bahwa layanan MBG akan kembali berjalan normal mulai Rabu (10/6).

Menurut Yohanes, program MBG memberikan manfaat yang besar, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

MBG Dikelola...

● Sambungan hal 1

lah satu jurusan unggulan di bidang pertanian itu mampu menghasilkan berbagai komoditas seperti sayur-sayuran dan ayam yang dapat dipasok ke dapur MBG.

Menurut Herman, hingga saat ini hasil produksi sekolah masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar karena belum adanya dapur MBG yang siap menerima pasokan.

“Kendalanya karena belum ada dapur MBG yang beroperasi di wilayah ini. Saat ini masih dalam proses pembangunan. Namun untuk stok sayur dan ayam kami siap didistribusikan ke dapur MBG setempat. Sejauh ini kami masih melayani kebutuhan masyarakat saja,” ujarnya, Selasa (9/6).

Menanggapi berbagai polemik yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG di tingkat nasional, Herman mengusulkan agar pengelolaan program tersebut lebih melibatkan masyarakat lokal maupun kantin-kantin sekolah yang telah tersedia. Menurutnya, langkah tersebut akan membuat pelaksanaan program menjadi

“Kalau saya melihat MBG itu sangat baik ketika tepat sasaran. Anak-anak dari latar belakang ekonomi ke bawah sangat antusias dan makan dengan lahap. Kita bisa melihat dari gerakan tubuh mereka yang begitu menikmati makanan yang diberikan,” ungkap Yohanes.

Yohanes menjelaskan, selama pelaksanaan MBG, pihak sekolah juga berupaya agar makanan yang tersisa tidak terbuang sia-sia. Yang mana, ketika ada siswa yang tidak hadir, guru biasanya mengalihkan jatah makanan kepada siswa lain yang membutuhkan.

“Bahkan saya pernah mengusulkan kalau ada anak-anak yang tidak mau makan, jatahnya bisa diberikan kepada anak-anak lainnya. Di sini juga ada orangtua yang melarang anaknya makan MBG. Karena itu saya sarankan anak-anak dari keluarga ekonomi bawah membawa tempat makan agar bisa menyimpan jatah yang lebih,” ungkapnya.

Yohanes mengatakan, saat ini, SD Inpres Liliba memiliki 796 siswa dengan total 52 guru dan pegawai. Berdasarkan pengalamannya selama program berjalan, Yohanes mengusulkan agar dilakukan pendataan terhadap siswa yang benar-benar ingin dan membutuhkan MBG.

“Saran saya kalau bisa didata saja anak-anak yang mau makan MBG dan itu lebih tepat sasaran. Karena ada juga anak-anak dari keluarga mampu yang memang tidak mau makan, bahkan orang tuanya melarang. Kalau makanan sudah disiapkan sesuai jumlah siswa tetapi tidak dimanfaatkan, tentu menjadi mubazir,” turnya.

Meski demikian, Yohanes menegaskan, usulan tersebut hanya sebagai masukan dari pihak sekolah. Menurutnya, keputusan terkait mekanisme penyaluran MBG tetap menjadi kewenangan pemerintah.

“Selama ini makanan yang dikirim sesuai jumlah seluruh siswa. Ini hanya usulan dari kami. Kebijakan-kebijakan itu tentu tergantung dari pemerintah. Kami tidak bisa memutuskan harus seperti apa, tetapi kami berharap program ini bisa semakin tepat sasaran

bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Program MBG di SMK Negeri 2 Ende, Kabupaten Ende, ternyata telah dihentikan sejak Januari 2026. Kepala SMK Negeri 2 Ende, Fransisco Soares, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ende telah mendatangi pihak sekolah untuk menyampaikan penghentian sementara layanan MBG.

Fransisco menjelaskan, SPPG Ndonga yang sebelumnya melayani kebutuhan MBG di SMKN 2 Ende tidak lagi menangani distribusi untuk sekolah tersebut. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kelanjutan pelayanan dari dapur penyedia yang baru.

Penghentian distribusi MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Ende. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marselinus Sina, S.Pd mengatakan, penyaluran program tersebut di sekolahnya dihentikan sementara mulai Selasa (9/6/2026).

“Mulai hari ini dihentikan sementara,” kata Marselinus singkat.

Kepala Wilayah SPPG di Sumba Timur, Vichorius Malo mengatakan, SPPG Sumba Timur masih tetap bekerja dengan standar operasional yang ada dan sesuai kewenangan serta tanggung jawab masing-masing di lapangan. Viktor menyebutkan, di Sumba Timur saat ini terdapat empat dapur SPPG yang beroperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.000 penerima manfaat dan program ini telah mempekerjakan sekitar 200 orang. Di antaranya sebagai kepala dapur, ahli gizi, akuntan dan relawan.

Ketua Satgas MBG Kota Kupang, Wildirni Ronald Otta atau yang akrab disapa Andre Otta, memastikan pelaksanaan program MBG di Kota Kupang tetap berjalan meski sempat terjadi keterlambatan penyaluran dana operasional dari pemerintah pusat.

Menurut Andre, keterlambatan tersebut terjadi akibat banyaknya hari libur dalam beberapa pekan terakhir se-

hingga proses penarikan dan pembaruan data keuangan mengalami penundaan.

“Dua minggu lalu karena libur cukup banyak, sehingga tidak ada penarikan data keuangan terakhir. Akibatnya belum ada transfer dana dari pusat. Kondisi ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Kota Kupang,” jelas Andre, Selasa (9/6).

Ia mengatakan, penyaluran dana mulai dilakukan kembali sejak pekan lalu, meskipun masih dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga telah menerima transfer dana tambahan.

Namun demikian, Andre mengakui masih ada beberapa dapur MBG yang baru menerima dana sehingga belum sempat melakukan pemesanan bahan baku untuk kegiatan operasional. Andre memastikan pelayanan program Makan Bergizi Gratis bagi para siswa di Kota Kupang tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami gangguan yang signifikan.

Selain memastikan kelancaran distribusi makanan, kata Andre Satgas MBG Kota Kupang juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah dapur SPPG, termasuk di SD Negeri Fatubena, untuk memastikan kesiapan layanan serta mengevaluasi berbagai aspek pendukung program.

Ketua Satgas MBG Kabupaten TTU, Kamillus Elu menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional tiga Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten TTU. Penghentian operasional tiga dapur tersebut dilaksanakan sejak Bulan April dan Mei 2026.

Ia menuturkan, penghentian ketiga dapur tersebut dengan alasan berbeda. Dapur SPPG Susulaku dituntut sementara lantaran terjadi dugaan keracunan makanan yang dialami siswa-siswi beberapa waktu lalu. (gus/mey/dim/rey/bbr)

Herman berharap pemerintah dapat segera memperluas jangkauan program MBG hingga ke daerah-daerah terpencil agar seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan makanan bergizi.

Ia menegaskan, pelajar tingkat SMP dan SMA di wilayah pelosok, termasuk siswa SMK Negeri 6 Detukeli Ende, juga membutuhkan dukungan gizi yang memadai untuk menunjang proses belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kepala SMP Negeri 2 Waingapu, Sumba Timur, Yohana Kahewamarak mengatakan,

Program MBG kurang tepat jika diberikan kepada siswa di wilayah perkotaan. “Sebagian besar anak di kota mereka tercukupi gizinya dibanding anak di luar kota, dan terutama yang jarak antara rumah dan sekolah itu jauh,” katanya.

Yohana mengatakan, sekolahnya telah menjadi penerima manfaat program MBG sejak Agustus 2025. Sebanyak 896 siswa setiap hari menerima makanan bergizi tersebut. Namun, jumlah penerima kini berkurang karena sebagian siswa telah dinyatakan lulus. Saat ini sekolah hanya menerima 592 paket makanan bergizi.

juang menempuh pendidikan dokter spesialis di Jawa, Bali ataupun Makassar.

“Ini cukup panjang dan cukup capek. Dengan dibukanya pendidikan dokter spesialis ini menjawab adik-adik kita terutama yang benar-benar mau mengambil seterusnya di NTT,” ungkapnya.

Dengan tuntutan yang ada saat ini, terutama dengan pemekaran kabupaten, kata dr Laurens, setidaknya daerah-daerah baru ini membutuhkan dokter spesialis.

“Angka kematian ibu dan bayi itu ternyata menjadi sesuatu yang penting untuk melihat apakah daerah itu sejahtera atau tidak. Karena itulah kehadiran teman-teman spesialis untuk berada di daerah 3T bisa tercukupi. Hari ini momen yang cukup baik akhirnya pergumulan kita selama ini terjawab, Undana memfasilitasi untuk pendidikan dokter spesialis,”

ujar dr. Laurens.

“Jumlah dokter obygyn se-NTT sudah cukup banyak, sudah sekitar 70-an orang dimana hampir 30 itu ada di Kota Kupang sedangkan yang lain terpencar, hanya mereka statusnya ada yang PPDS mungkin ada yang satu tahun terus pulang. Sehingga saya menyampaikan kepada ibu dekan, boleh tidak pada saat penerimaan kita terima anak-anak kita kalau bisa yang harus di sini. Mengisi kebutuhan di sini bukan di Jawa, Bali dan lainnya setelah mereka jadi,” tambahnya.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Robinson G. Faggidae, Sp.An-TI, FIP juga menyambut baik program pendidikan dokter spesialis di Undana.

“Ini merupakan satu hal yang luar biasa ketika kita di

la mengatakan, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30 persen siswa yang dinilai-nya benar-benar membutuhkan makanan bergizi. Sebagian besar siswa, kata dia, sebelum berangkat ke sekolah sudah mendapatkan makanan bergizi di rumah.

Namun demikian, ia menilai program ini tetap memiliki manfaat seperti menghemat pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. “Kalau dinilai tepat gizi, tetapi tidak semua. Ada anak-anak yang di rumah memiliki standar makanan sudah bergizi. Ya... anak-anak lain bisa mengurangi jajan di kantin,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah sekolah di Kota Waingapu yang belum menjadi penerima program MBG. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil.

“Sebenarnya MBG ini tidak adil. Karena apa, kita di sekolah kota ini dapat, tetapi ada sekolah tetangga lain tidak dapat,” ungkapnya.

Meski demikian, Yohana tetap mengakui, program ini dibutuhkan oleh sebagian masyarakat yang kebutuhan gizinya belum terpenuhi di rumah. “Kita bersyukur ada anak-anak yang tertolong dengan program ini,” kata dia. (bet/dim)

NTT bisa buka program PPDS Anestesi bekerjasama dengan FKHH Undana. Dimana saat ini kami di NTT sendiri itu baru 40 dokter spesialis anestesi. Apabila kita bandingkan dengan jumlah rumah sakit dan jumlah layanan, itu masih sangat kurang. Di Kupang sendiri kami baru 11 orang sedangkan rumah sakit sudah berjumlah kurang lebih sekitar 15,” katanya.

“Untuk layanan emergency dan layanan kamar operasi, itu tidak bisa tidak, dokter anestesi harus ada. Itu yang menjadi tujuan kami, kita harus membuka pendidikan anestesi di NTT supaya yang pertama bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit akan dokter anestesi, yang kedua bisa juga memfasilitasi anak NTT yang mau belajar anestesi tidak perlu keluar NTT tapi mereka bisa belajar cukup di Undana dan Rumah Sakit Ben Mboi Kupang,” tambahnya. (uzu)



Swasti Sari Mobile

Bisa Transaksi Apa saja, Kapan Saja, Dimana saja.

 Silahkan Mendaftar melalui Kantor Cabang Terdekat



Transfer Sesama Anggota, Transfer Antar Produk, dan Transfer dari Bank.

Top Up E-Wallet (Ovo, Link Aja, ShopeePay, dll)

Beli Token Listrik / Pulsa Dll.

Fisip Undana Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi

KUPANG, PK - Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) mengikuti kegiatan diskusi dan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi sebagai Ujian Akhir Semester (UAS) di Ruang Teater, Selasa (9/6).

Kegiatan yang digelar dalam mata kuliah Politik Agraria dan Tata Ruang ini tidak sekadar menjadi ajang menonton film, tetapi juga ruang pembelajaran kritis bagi mahasiswa untuk memahami berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang terjadi di Indonesia.

Dosen pengampu mata kuliah Politik Agraria dan Tata Ruang, Yeftha Yerianto Sabaat, menjelaskan, mahasiswa tidak hanya diwajibkan mengikuti nobar dan diskusi, tetapi juga diminta menyusun ulasan serta esai kritis terkait pesan yang terkandung dalam film tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya menonton film, tetapi mahasiswa dituntut memberikan review sekaligus catatan kritis berupa esai singkat mengenai film Pesta Babi," ujar Yeftha.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan melatih ke-



NOBAR - Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik (Fisip) Undana sedang mengikuti kegiatan diskusi dan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi sebagai Ujian Akhir Semester mereka, Selasa (9/6).

mampuan analisis mahasiswa terhadap berbagai realitas sosial, khususnya yang berkaitan dengan konflik agraria dan kebijakan tata ruang.

"Semoga kegiatan ini dapat membangun sikap kritis mahasiswa terhadap realitas yang ada, misalnya kasus-kasus agraria dan politik tata ruang, yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari ujian akhir semester yang mendapat dukungan penuh dari pihak kampus.

Yeftha berharap setelah me-

nyaksikan film tersebut, mahasiswa mampu menghasilkan refleksi dan catatan kritis terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

"Banyak sekali diskursus di luar sana mengenai film ini. Kami ingin memastikan mahasiswa memiliki nalar kritis untuk melihat dan menganalisis persoalan yang diangkat dalam film tersebut," tegasnya.

Ia berharap agar mahasiswa tidak hanya memahami teori yang diperoleh di ruang kuliah, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang di

masyarakat serta berkontribusi melalui gagasan dan tulisan yang kritis.

Salah satu peserta, Tabita Silaban, mahasiswa semester VI Prodi Ilmu Politik FISIP Undana, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan sangat bermanfaat.

Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang refleksi mengenai persoalan hak atas tanah adat yang kerap belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

"Film ini membantu kami berpikir kritis bahwa hak atas tanah adat belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah.

Mahasiswa, khususnya Ilmu Politik, perlu menghidupkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kebijakan pemerintah agar hak-hak masyarakat adat lebih dihargai dan kepentingan masyarakat lebih diperhatikan," ungkap Tabita.

Kegiatan diskusi dan nobar tersebut juga dihadiri oleh dosen Fisip Undana, Yohanes Jimmy Nami, dan Frans BR Humau, yang turut memberikan pandangan akademis terkait isu-isu agraria, kebijakan publik, dan tata ruang yang menjadi tema utama dalam film tersebut. (rey)



SIDAK - Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey E Pelt, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu OPD, Selasa (9/6).

Jeffrey Pelt Sidak ke Sejumlah OPD

■ Perkuat Disiplin ASN dan Pelayanan Masyarakat

KUPANG, PK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffrey E Pelt, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Selasa (9/6).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat disiplin aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Dalam sidak tersebut, Sekda Jeffrey mengunjungi sejumlah instansi, yakni Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

Pada setiap lokasi yang dikunjungi, Jeffrey melakukan pemeriksaan daftar hadir pegawai, mengecek tingkat kehadiran ASN, serta memantau langsung aktivitas pelayanan

yang sedang berlangsung.

Ia juga berdialog dengan pimpinan perangkat daerah dan para pegawai guna mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurut Jeffrey, disiplin pegawai menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, kehadiran ASN harus sejalan dengan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Setiap ASN harus menyadari bahwa kehadirannya di kantor bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disiplin harus menjadi budaya kerja yang terus dijaga," tegasnya.

Ia mengingatkan, seluruh perangkat daerah agar memastikan pelayanan publik berlangsung cepat, responsif,

dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang profesional, ramah, dan berkualitas.

Selain itu, Jeffrey meminta para pimpinan perangkat daerah untuk terus memperkuat pengawasan internal terhadap disiplin pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan akuntabel.

Ia menilai semangat kerja sama dan integritas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan di Kota Kupang.

Sidak yang dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Ia berharap tercipta peningkatan disiplin ASN, efektivitas kerja, serta kualitas pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kota Kupang. (rey)

Polisi Limpahkan Tersangka Kejari

● Penganiayaan Anak di Kota Kupang

KUPANG, PK - Penyidik Unit Reskrim Polsek Kota Raja, Polresta Kupang Kota melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Senin (8/6).

Kegiatan Tahap II tersebut dilaksanakan oleh Ps Kanit Reskrim Polsek Kota Raja, IPDA Frid Sia, SH, bersama Brigpol Selsily Erny, SH, dan Brigda Heli Zacharias.

Tersangka yang diserahkan berinisial DR, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai aparat sipil negara (ASN) dan berdomisili di Kelurahan Airnora, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sementara korban berinisial C, perempuan yang bekerja sebagai karyawan honorer dan juga merupakan warga Kelurahan

Airnora, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/049/III/SPKT/2025/Sektor Kota Raja/Polresta Kupang Kota tanggal 20 Maret 2025.

Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan didampingi penasihat hukum.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari, SIK, MM, melalui Kapolsek Kota Raja, AKP Leyfrids D Mada, SH, mengatakan, pelaksanaan

Tahap II merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap," ujarnya.

Ia menegaskan pihak kepolisian berkomitmen menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya Tahap II tersebut, proses penanganan perkara kini memasuki tahap penuntutan dan selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses hukum berikutnya. (uan)



Pendaftaran MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER 2026/2027 GANJIL

Jalur Non RPL / Jalur Umum
(Lulusan SMA/SMK/Sederajat)
4 Mei - 22 Juli 2026

Jalur RPL / Alih Kredit / Transfer
4 Mei - 24 Juni 2026

Program Magister & Doktor
Agustus - Oktober 2026

Fakultas dan Program Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Manajemen (A)
- Ekonomi Pembangunan (Unggul)
- Ekonomi Syariah (Baik Sekali)
- Akuntansi (A)
- Akuntansi Keuangan Publik (Unggul)
- PJJ Pariklat (A)
- Kewirausahaan (Baik)

Fakultas Sains dan Teknologi

- Statistika (Unggul)
- Matematika (Baik Sekali)
- Biologi (Unggul)
- Teknologi Pangan (A)
- Agribisnis (A)
- Perencanaan Wilayah dan Kota (B)
- Sistem Informasi (Baik Sekali)
- Sains Data (Terakreditasi)

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Ilmu Administrasi Negara (Unggul)
- Ilmu Administrasi Bisnis (A)
- Ilmu Hukum (B)
- Ilmu Pemerintahan (Unggul)
- Ilmu Komunikasi (B)
- Ilmu Perpustakaan (Unggul)
- Sosiologi (A)
- Sastra Inggris (B)
- Perpajakan (Terakreditasi Sementara)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Unggul)
- Pendidikan Bahasa Inggris (Unggul)
- Pendidikan Biologi (Unggul)
- Pendidikan Fisika (Unggul)
- Pendidikan Kimia (Unggul)
- Pendidikan Matematika (Unggul)
- Pendidikan Ekonomi (Unggul)
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Unggul)
- Teknologi Pendidikan (Unggul)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (A)
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (A)
- Program Pendidikan Profesi Guru (Baik Sekali)
- Pendidikan Agama Islam (Baik)

Program Magister (S2)

- (S2) Magister Akuntansi (Baik)
- (S2) Magister Studi Lingkungan (B)
- (S2) Magister Manajemen Perikanan (A)
- (S2) Magister Administrasi Publik (Baik Sekali)
- (S2) Magister Manajemen (Unggul)
- (S2) Magister Pendidikan Dasar (A)
- (S2) Magister Pendidikan Matematika (Unggul)
- (S2) Magister Pendidikan Bahasa Inggris (Unggul)
- (S2) Magister Pendidikan Anak Usia Dini (Baik Sekali)
- (S2) Magister Hukum (Terakreditasi Sementara)

Program Doktor (S3)

- (S3) Doktor Ilmu Manajemen (Unggul)
- (S3) Doktor Administrasi Publik (Baik)

Sekolah Vokasi

- (D3) Perpajakan (Baik Sekali)
- (D3) Keperawatan (B)
- (D3) Teknologi Informasi
- (D4) Akuntansi Bisnis Digital
- (D4) Manajemen Logistik
- (D3) Penyiaran (Broadcast Journalism)

Info Pendaftaran
081246352849

Non Sistem Paket Semester (Non Sipas)
mulai dari **Rp500.000** /per semester

Program Magister (S2)
mulai dari **Rp8.500.000** /per semester

Sistem Paket Semester (Sipas)
mulai dari **Rp1.150.000** sampai **2.900.000** /per semester

Program Doktor (S3)
mulai dari **Rp12.500.000** /per semester

Katapa milih UTP?

- Kampus negeri terakreditasi A
- Tanpa tes masuk
- Menerima lulusan paket C
- Kuliah sambil kerja
- Biaya kuliah terjangkau
- Tanpa Batasan usia, tahun (jazaz dan domili)

Link Pendaftaran
admisi-sia.ut.ac.id

@utkupang 081339241979 kupang.ut.ac.id